

e-news letter

SEPTEMBER II 2020

PKSPARLEMEN

KREATIF, ATRAKTIF, SUBSTANTIF

FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



H. Nurhasan Zaidi, S.Sos.I

MENAG JANGAN ASAL BICARA

Soal radikalisme



Pemerintah Yang Kehilangan Fokus

Dimasa krisis ini pemerintah lebih senang mengejar pertumbuhan tanpa pemerataan. Ajakan *sense of crisis* manis dibibir namun 'ambyar' di realitas. Sejumlah proyek ambisius dikejar dimasa yang tidak baik ini seperti food estate dan ibukota kota negara. Paling semangat membahas regulasi yang menerabas banyak hal, tengok saja proses penyusunan RUU Omnibus Law Cipta kerja yang tanpa kenal wabah dan masa reses, maju terus pantang mundur.

Kita melihat bahwa Pemerintah menghadapi situasi krisis ini bertindak sporadis dan tanpa alur yang memadai, apa yang ada dihadapan itu yang dihadapi. Apa yang menjadi ambisi itu yang dijalankan. Sudah lama meninggalkan angka dan data, terlebih jika dia merujuk kepada jumlah pasien yang terpapar atau dokter yang meninggal. Ironisnya, jika semua terkait angka virtual di papan saham maka 'belingsatan' luar biasa. Padahal angka fatality rate, mortality dan lainnya sudah melonjak sejak lama. Komitmen

economy first, health first tidak tergambar sama sekali.

Kebijakan penerapan protocol kesehatan yang dialih tugaskan kepada paramiliter sungguh kontraproduktif, terlebih dengan melibatkan preman pasar untuk memastikan kedisiplinan warga sejatinya semakin menunjukkan ketidaksiplinan dalam menyusun sebuah kebijakan. Alih-alih menertibkan, bisa jadi semacam legitimasi atas sejumlah tindakan yang tidak diinginkan. Cukuplah penggunaan TNI dan Polri, dengan pendekatan yang

edukatif dan persuasive.

Dimasa krisis ini pemerintah lebih senang mengejar pertumbuhan tanpa pemerataan. Ajakan *sense of crisis* manis dibibir namun 'ambyar' di realitas. Sejumlah proyek ambisius dikejar dimasa yang tidak baik ini seperti food estate dan ibukota kota negara. Paling semangat membahas regulasi yang menerabas banyak hal, tengok saja proses penyusunan RUU Omnibus Law Cipta kerja yang tanpa kenal wabah dan masa reses, maju terus pantang mundur.

Disisi lain penegakan hukum carut marut, seorang buronan kelas kakap bisa lalu lalang hilir mudik dan merusak tatanan hukum dari atas hingga bawah. Memberi kemewahan kepada penegak hukum yang seharusnya menjadi penuntut hukum. Rumahnya persoalan itu tidak menjadi perhatian dan masalah besar bagi pemegang kuasa. Dianggap sebagai sesuatu yang lumrah terjadi dan tidak perlu direpson berlebihan.

Karena bagi pemegang kuasa yang perlu direpson adalah hal-hal non substansial seperti tampang dan penampilan. Jika seseorang mempunyai wajah Good looking dan punya kemampuan tahfidz menjadi sangat berbahaya sera radikal. Narasi seperti ini



berulang kali ditebar untuk membuat kontroversi, meski sekian kali minta maaf namun ke esokan hari mengulangi kesalahan yang sama. Seperti siklus yang tidak pernah usai.

Negara kita saat ini membutuhkan suluh penerang, karena sedang melewati lorong gelap yang tidak pernah bertepi. Pemimpin tunggang langgang mencari perlindungan dan proteksi, sedangkan rakyat dibiarkan berjuang sendiri. Mulai nampak dihadapan

menggelayut krisis ekonomi, namun dipersiapkan dengan alakadarnya dan apa adanya. Setiap warga dibiarkan bertahan dengan caranya sendiri-sendiri. Kebijakan "naik-naik kepuncak gunung" di masa sulit tidak pernah berhenti, dari mulai rencana penghapusan BBM Premium, kenaikan Bea Materai, BPJS Kesehatan dan lain sebagainya.

Menyoal Pernyataan terkait Radikalisme

Legislator PKS: Menag Jangan Asal Bicara!

Berkali kali Menag melakukan blunder yang menyakiti umat Islam. Harusnya kita bangga bahwa generasi muda bangsa yang 'good looking' mulai banyak yang mau mengabdikan dirinya berdakwah. Ini cukup menginspirasi, jangan malah di generalisir sebagai modus penyebaran radikalisme tanpa dasar

H. NURHASAN ZAIDI, S.Sos.I

Anggota Komisi VIII DPR RI

Jakarta (05/09) — Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Nurhasan Zaidi, menanggapi pernyataan Menag Fachrulrozi yang menyatakan radikalisme masuk melalui anak 'good looking' yang hafal Al-Qur'an, saat mengisi seminar di Kempan RB beberapa waktu silam.

"Apakah salah, jika ada anak 'good-looking' yang hafizh Qur'an, faham bahasa 'Arab, faqih dalam agama berdakwah dilingkungan pemerintah? haruskah kita labeli pemuda itu dengan teroris dan radikal?"

Menag gagal paham, ini Gegabah!", ungkap Nurhasan,

Politisi PKS ini menyangkan pernyataan Menteri Agama yang disampaikan dalam forum

tersebut, yang berdasarkan asumsi-asumsi tanpa bukti dan pemahaman yang komprehensif.

"Berkali kali Menag melakukan blunder yang menyakiti umat Islam. Harusnya kita bangga bahwa generasi muda bangsa yang 'good looking' mulai banyak yang mau mengabdikan dirinya berdakwah. Ini cukup menginspirasi, jangan malah di generalisir sebagai modus penyebaran radikalisme tanpa dasar", jelasnya.

Dalam keterangannya, Nurhasan sangat menyesalkan kejadian tersebut dan meminta Menteri Agama segera meminta maaf dan mengklarifikasi pernyataannya.

"Lebih baik menteri agama Instropeksi diri dan berbenah ke dalam. Fokus pada tupoksinya memperbaiki kualitas Madrasah dan Penyuluh Agama karena inilah ujung tombak untuk memerangi radikalisme", ungkapnya.

"Menag nampaknya belum paham bahwa lulusan madrasah kita, dari sisi persoalan mendasar seperti membaca qur'an saja masih rendah, belum lagi kefahaman Islam. Kita khawatir kualitas lulusan dan peran KUA yang rendah menjadi penyebab permasalahan ini", tegasnya.

Diakhir tanggapannya Nurhasan meminta Menteri Agama untuk menahan diri dan berhati-hati agar tidak membangkitkan isu radikalisme yang memecah belah umat. Fokus bersama masyarakat mencari solusi yang positif atas permasalahan degradasi moral yang sedang menimpa bangsa.

"Kita sama-sama sepakat bahwa Terorisme dan radikalisme menjadi musuh bersama. Tapi ada cara yang lebih elegan dan lebih pantas dalam mengantisipasi penyebaran itu, meng-harus elok mengkomunikasikannya ke masyarakat umum. Bil Hikmah Wal Mau'idzoh Hasanah", pungkasnya.





FPKS Protes Menag Sebut Radikalisme Masuk dari Good Looking - Hafidz

Kami heran kenapa Menag kerap kali muncul dengan pernyataan kontroversial yang mendeskreditkan umat Islam utamanya generasi yang punya ghirah belajar agama

Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA

Ketua Fraksi PKS DPR RI

Jakarta (04/09) — Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini memprotes keras pernyataan Menteri Agama Fachrul Razi yang mengatakan bahwa strategi radikalisme masuk melalui orang yang berpenampilan menarik atau good looking, bisa bahasa arab, hafiz, dan memiliki pemahaman agama yang baik.

Menurut Jazuli pernyataan Menag ini menyakitkan umat Islam karena stereotype (tuduhan negatif) yang jelas-jelas disematkan kepada umat Islam yang paham agama bahkan hafiz dan berpenampilan menarik atau good looking.

Ini bisa menimbulkan syak wasangka dan kegaduhan di masyarakat terhadap ghirah umat yang sedang giat-giatnya belajar agama.

"Kami heran kenapa Men-

ag kerap kali muncul dengan pernyataan kontroversial yang mendeskreditkan umat Islam utamanya generasi yang punya ghirah belajar agama. Jangan terus menurus umat ini disudutkan dan dituduh radikal apalagi secara secara sembronon menyematkan stereotype kepada para hafiz dan generasi umat yang punya pemahaman agama yang baik," ungkap Jazuli geram.

Fraksi PKS kecewa terhadap Menag yang tidak komperhensif dan objektif dalam memahami permasalahan. Di tengah darurat moral dan akhlak generasi bangsa mestinya menteri agama mempromosikan agar kita semua kembali pada agama dengan belajar agama yang

baik, memakmurkan masjid, menghafal al-quran dll. Bukan malah menebar ketakutan dengan menuduh orang belajar agama, punya pemahaman agama yang baik, bahkan hafiz sebagai pintu masuk radikalisme.

"Ini menunjukkan menteri agama tidak paham peta masalah kebangsaan dan denyut nadi keberagamaan khususnya umat Islam. Akibatnya salah dalam mengambil kesimpulan sehingga keluar pernyataan yang kontraproduktif dan menyakitkan umat. Dan ini berbahaya karena kebijakan negara bisa salah kaprah," tegas Jazuli.

Anggota Komisi I DPR ini meminta Menag dan jajaran Kementerian Agama tidak lagi gegabah dalam membuat pernyataan soal radikalisme dengan stereotype tertentu kepada umat Islam. Umat Islam tegas melawan radikalisme dan terorisme karena jelas bukan bagian dari ajaran Islam. Sehingga mengatakan orang paham agama dan hafiz sebagai pintu masuk radikalisme sungguh menyakitkan.

Sebelumnya, Fachrul Razi



menyungkapkan strategi paham radikal masuk di lingkungan ASN dan masyarakat di acara webinar bertajuk 'Strategi Menangkal Radikalisme Pada Aparatur Sipil Negara', yang disiarkan di YouTube KemenPAN-RB, Rabu (2/9).

Menurut Fachrul, salah satu strategi kaum radikalisme masuk itu melalui seorang anak good looking atau paras yang

menarik.

"Cara masuk mereka gampang, pertama dikirimkan seorang anak yang good looking, penguasaan bahasa Arab bagus, hafiz, mulai masuk, ikut-ikut jadi imam, lama-orang orang situ bersimpati, diangkat jadi pengurus masjid. Kemudian mulai masuk temannya dan lain sebagainya, mulai masuk ide-ide yang tadi kita takutkan," ucapnya.

Karena PKS bukan eksekutif, bukan berarti kami harus diam. Tetapi kami berupaya mencari rumusan-rumusan terbaik untuk memberi tawaran solusi alternatif bagi pemerintah

Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA

Ketua Fraksi PKS DPR RI

Ketua Fraksi PKS DPR : Pemerintah Harus Prioritaskan Nyawa Rakyat

bangkit jika rakyat sakit", tegas Aleg PKS dari Dapil Banten II ini.

Anggota Komisi I DPR RI ini pun mengingatkan pemerintah untuk memakai anggaran negara secara bijaksana dalam menanggulangi pandemi Covid-19.

"Setiap rupiah yang mengalir dari APBN harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Mari kita fokus lindungi kesehatan rakyat. Penggunaan anggaran harus tepat sasaran, harus fokus, tidak boleh ada penumpang gelap", jelas Jazuli.

Fraksi PKS, lanjut Jazuli, senantiasa berkomitmen untuk memberi solusi atas setiap permasalahan bangsa ekaligus mengutamakan kepentingan umat dan rakyat.

"Karena PKS bukan eksekutif, bukan berarti kami harus diam. Tetapi kami berupaya mencari rumusan-rumusan terbaik untuk memberi tawaran solusi alternatif bagi pemerintah", sambung Jazuli.

Jakarta (08/09) — Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini, meminta kepada pemerintah untuk mengutamakan kesehatan dan keselamatan seluruh rakyat Indonesia.

Hal ini disampaikan dalam Webinar Covid-19 FPKS bertajuk 'PKS Menjaga Indonesia: Kedaulatan Vaksin, Kedaulatan Rakyat', di Jakarta, Selasa (08/09).

Menurut Jazuli, prioritas pemerintah yang terlalu economic heavy justru berpotensi mengorbankan nyawa rakyat.

"Fraksi PKS meminta kepada pemerintah untuk memprioritaskan nyawa rakyat. Nyawa rakyat adalah nomor satu. Ekonomi tidak akan



Indonesia “Ditakuti” 59 Negara

HNW: Saatnya Presiden Turun Pimpin Penanganan Covid-19

“Bukan hanya WNI tidak diterima masuk ke 59 negara itu, bahkan ada 11 negara, seperti Amerika Serikat dan Australia mengimbau warganya untuk tidak pergi ke Indonesia, karena penyebaran Covid-19, dan fasilitas kesehatan yang tidak memadai

Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A

Anggota Komisi VIII DPR RI

Jakarta (10/09) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid, prihatin dengan pengelolaan wabah Covid-19 oleh Pemerintah yang belum berhasil juga mengatasi Covid-19, landai pun belum, malah korban semakin banyak, sehingga justru menghadirkan ketakutan di sebagian masyarakat Internasional yang ‘boikot’ kedatangan warga negara Indonesia (WNI) oleh 59 negara di dunia.

“Bukan hanya WNI tidak diterima masuk ke 59 negara itu, bahkan ada 11 negara, seperti Amerika Serikat dan Australia mengimbau warganya untuk tidak pergi ke Indonesia,

karena penyebaran Covid-19, dan fasilitas kesehatan yang tidak memadai,” ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Kamis (10/09).

HNW sapaan akrabnya menilai sikap banyak negara tersebut seharusnya bisa menjadi koreksi dan bahan instrospeksi untuk menyemangati pemerintah melaksanakan kewajibannya, untuk lebih serius dan profesional melindungi seluruh Rakyat Indonesia dan menyelamatkan mereka dari masalah Covid-19 yang sudah mewabah dan menghadirkan darurat kesehatan nasional ini.

“Betul bahwa karena

Covid-19, Indonesia pun memberlakukan hal sejenis kepada beberapa negara asing, tetapi jumlah negara yang ‘lock-down’ Indonesia itu terlalu banyak, yang menggambarkan meluasnya ketidakpercayaan masyarakat Internasional terhadap penanganan pandemi covid-19 oleh Pemerintah Indonesia” ujarnya.

Lebih lanjut, Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jakarta II (termasuk luar negeri) ini menuturkan bahwa pemerintah Indonesia perlu melakukan koreksi dan maksimalisasi usaha dan meningkatkan kualitas perlindungan terhadap WNI dalam menyelesaikan masalah Covid-19 dengan menghadirkan kejujuran data, kesatupaduan dan konsistensi kebijakan, serta profesionalitas yang bisa dipercaya oleh dunia internasional.

“Ini juga terkait dengan marwah dan harga diri bangsa dan negara kita, selain pelaksanaan kewajiban melindungi seluruh WNI” tegasnya.

HNW mendesak agar Presiden Jokowi tampil terdepan, ambil tanggung jawab



Foto: Antaranews.com

sebagai Kepala Negara, agar berbagai silang sengketa pelaksanaan kebijakan soal penanganan covid -19 bisa segera diselesaikan, sehingga ada harmoni dan sinergi yang positif dan produktif antara pemerintah pusat (termasuk antar Menteri) dengan pemerintah daerah. Tujuannya adalah agar mereka lebih kompak dan satu kata dalam menangani wabah Covid-19 ini, sehingga persoalan covid-19 dengan berbagai dampaknya, termasuk ketidakpercayaan masyarakat Internasional itu dapat diselesaikan dengan baik.

“Dan dengan itu penanganan Covid-19 bisa lebih efektif yg diharapkan dengan itu

kepercayaan Internasional kepada Indonesia bisa segera pulih kembali. Pemerintah harus betul-betul menjadi teladan dalam mengimplementasikan protokol Covid-19 agar rakyat percaya dan bisa diajak berkontribusi atasi Covid-19,” jelasnya.

HNW mengkritik sikap Pemerintah yang dalam situasi seperti sekarang, dimana 59 negara menutup pintu terhadap pendatang dari Indonesia, Indonesia malah masih membuka pintu kedatangan TKA dari China, negeri awal menyebarkan Covid-19.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



Tolak Sertifikasi Ulama oleh Kemenag!

- ✓ Bagi pendakwah substansi peningkatan pengetahuan dan pemahaman dakwah adalah satu hal yang baik dan mutlak dilakukan
- ⚠ Menjadi persoalan ketika pemerintah campur tangan menentukan isi dan menerbitkan sertifikat. Hal ini bisa disalahpahami pemerintah mengontrol dakwah dan kehidupan beragama
- 👍 Sebagai langkah alternatif yang konstruktif, **Pemerintah cukup memberikan rambu-rambu dan pedoman umum bagaimana meningkatkan kesadaran keberagaman dan kebangsaan**

Selama ini ormas-ormas keagamaan dan para pendakwah juga terus meningkatkan pengetahuan dan pemahaman materi dakwah yang berangkat dari rasa tanggung jawab dalam membimbing dan membina umat yang lebih baik. Seharusnya ini yang didukung, difasilitasi dan diperkuat oleh Pemerintah, bukan malah sepihak mengadakan sertifikasi

Dr. H. Jazuli Juwaini, MA
Ketua Fraksi PKS DPR RI





Isu Tiongkok Akan Bangun Pangkalan Militer

Anggota DPR: Perlu Dikaji Mendalam dan Diwaspadai

Yang penting info tersebut perlu menjadi masukan bagi kita dan harus dikaji secara mendalam. Walaupun saat ini belum direalisasikan tetapi setidaknya ada kemauan atau niat dari Tiongkok. Info tersebut paling tidak memberi kita peringatan akan adanya agenda dan operasi dari negeri Tiongkok dan boleh jadi Amerika terhadap negeri-negeri yang disebut, terutama Indonesia. Ini yang harus diwaspadai

H. SUKAMTA, Ph.D

Anggota Komisi I DPR RI

Jakarta (05/09) -- Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKS, Sukamta, menanggapi rencana Tiongkok yang akan membangun pangkalan militer di beberapa negara sebagai bagian dari proyek OBOR, termasuk Indonesia.

Sukamta menegaskan pihaknya tentu tidak bisa menerima info tersebut mentah-mentah, karena boleh jadi itu

bagian dari pertarungan perebutan pengaruh antarnegara besar.

"Yang penting info tersebut perlu menjadi masukan bagi kita dan harus dikaji secara mendalam. Walaupun saat ini belum direalisasikan tetapi setidaknya ada kemauan atau niat dari Tiongkok. Info tersebut paling tidak memberi kita peringatan akan adanya agenda

dan operasi dari negeri Tiongkok dan boleh jadi Amerika terhadap negeri-negeri yang disebut, terutama Indonesia. Ini yang harus diwaspadai," urai Sukamta.

Ketua DPP PKS Bidang Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri ini menambahkan bahwa kita harus menjaga agar politik luar negeri Indonesia terjaga bebas aktif. Kita apresiasi sikap Kemenlu yang tegas soal ini. Kita minta pemerintah terus konsisten agar tidak condong terhadap tarikan negara-negara besar.

"Supaya bisa terus menjaga sikap bebas aktif secara politik, maka pemerintah RI harus menjaga supaya secara ekonomi tetap mandiri tidak berhutang budi terhadap Tiongkok. Kalau hutang budi terlalu banyak pasti akan sulit menghadapi tekanan bila saatnya mereka menagih kepada Indonesia," ujar Wakil Ketua Fraksi PKS ini.



Terkait Pelarangan WNI Masuk Malaysia

Aleg PKS: Kita Harus Hormati Kebijakan Mereka Melawan Pandemi

“Upaya Pemerintah Malaysia dalam melawan Covid-19 dinegaranya dengan melarang masuk warga dari 23 negara ke Malaysia harus kita hormati. In sya Allah hasil kerja keras Malaysia juga dirasakan oleh saudara-saudara kita WNI di sana. Mereka lebih aman dari penyebaran Covid-19

KH. TORIQ HIDAYAT, Lc

Anggota Komisi I DPR RI

Tasikmalaya (08/09) — Pelarangan masuk ke Malaysia bagi warga negara Indonesia ditanggapi dengan serius oleh Anggota DPR RI asal Fraksi PKS, Toriq Hidayat.

“Pelarangan masuk ke Malaysia yang dikeluarkan oleh Pemerintah Malaysia tidak hanya dimaksudkan untuk Indonesia saja. Tetapi ada 23 negara yang dilarang masuk ke negeri Jiran karena negara-negara tersebut memiliki catatan kasus infeksi virus corona lebih dari 150.000 kasus”, ungkap Toriq. Indonesia termasuk yang

dilarang, mengingat kasus yang ada di Indonesia sudah hampir mencapai angka 200.000 kasus. Tidak hanya itu, pasangan warga negara Malaysia dan pelajar yang berasal dari ke-23 negara juga dilarang masuk ke negaranya sendiri.

“apa yang dilakukan oleh Pemerintah Malaysia adalah upaya menjaga hasil positif Malaysia dalam menaklukkan Covid-19” ungkap anggota Komisi I ini.

Lewat akun Twitter resmi Kementerian Kesehatan Malaysia mengumumkan 6

kasus baru dengan nol kematian pada hari rabu lalu (2/9/2020).

Total Negeri Jiran memiliki 9.630 kasus positif dengan 128 kematian dan 9.079 pasien dinyatakan sembuh.

“Kendati sukses melandaikan kasus positif, upaya yang diteruskan oleh Pemerintah Malaysia dalam melawan Covid-19 menunjukkan bahwa pandemi tidak akan segera berakhir di Malaysia” jelas Toriq.

Bahkan Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin memutuskan untuk memperpanjang pembatasan pergerakan hingga 31 Desember 2020.

“Upaya Pemerintah Malaysia dalam melawan Covid-19 dinegaranya dengan melarang masuk warga dari 23 negara ke Malaysia harus kita hormati. In sya Allah hasil kerja keras Malaysia juga dirasakan oleh saudara-saudara kita WNI di sana. Mereka lebih aman dari penyebaran Covid-19,” Tutup Toriq.



59

NEGARA BLOKIR WNI

Imbas Kebijakan Covid-19 Indonesia yang Belum Tepat?

59 negara menurut laporan Kementerian Luar Negeri RI menutup pintu bagi masuknya WN Indonesia terkait tingginya angka Covid-19 di Indonesia. Malaysia menjadi salah satu negara yang melarang masuknya WN Indonesia.



Keselamatan rakyat prioritas utama

Prioritas utama saat ini adalah menyelamatkan nyawa rakyat dari pandemi covid-19. Soal ekonomi, diplomasi, adalah prioritas sekian

JAZULI JUWAINI

Ketua Fraksi PKS DPR RI



Saatnya menata ulang Kebijakan

Pemerintah harus segera mengambil sikap dan menata ulang format kebijakannya. Jangan meng-anakemaskan ekonomi tapi meninggalkan kesehatan

NETTY PRASETIYANI

Anggota Komisi IX DPR RI



Harus Jadi Bahan Koreksi Pemerintah

Sikap banyak negara tersebut seharusnya bisa menjadi koreksi dan bahan introspeksi untuk menyemangati pemerintah melaksanakan kewajibannya

HIDAYAT NURWAHID

Anggota Komisi VIII DPR RI



Tidak ada pilihan lain, Turunkan angka positif covid-19

Berbagai lobi juga akan sia-sia kecuali satu hal dilakukan: menurunkan angka konfirmasi positif Covid-19. Tidak ada jalan lain.

KURNIASIH MUFIDAYATI

Anggota Komisi IX DPR RI



Nasir Djamil: PT 20 Persen Hanya Untungkan Pemodal Dan Menyia-nyiakan Suara Rakyat

“Sejumlah fraksi di DPR RI yang memiliki kursi minimalis menginginkan ambang batas presiden hanya 5 persen. Jika PT dipaksakan sebanyak 20 persen, maka tidak menutup kemungkinan akan membunuh sistem demokrasi di Indonesia.

H. MUHAMMAD NASIR DJAMIL, M.Si

Anggota Komisi II DPR RI

Jakarta (07/09) — Tokoh bangsa seperti Rizal Ramli dan Rocky Gerung mengajukan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi perihal presidential threshold atau ambang batas presiden sebesar 20 persen.

Sejumlah politisi pun angkat bicara mengenai langkah Rizal Ramli cs yang mengajukan permohonan uji materi tersebut. Salah satunya politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Nasir Djamil.

Nasir mengakui bahwa saat ini Badan Legislatif DPR RI sedang menggodok aturan tersebut dalam pembahasan RUU Pemilu.

“Soal itu nanti akan

dibahas di RUU Pemilu. Saat ini RUU itu sedang disinkronisasi dan harmonisasi di Baleg DPR,” ucap Nasir kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (6/9).

Disinggung mengenai langkah Rizal Ramli cs yang dianggap masyarakat kurang pas dalam mengajukan gugatan ke MK perihal PT 20 persen tersebut, Nasir memberikan jawab diplomatik.

“Bukan kurang pas atau tidak pas, tapi memang RUU Pemilu ini sedang diharmonisasikan dan disinkronisasikan,” katanya.

Nasir menambahkan, sejumlah fraksi di DPR RI yang memiliki kursi minimalis menginginkan ambang batas presiden hanya 5 persen. Jika

PT dipaksakan sebanyak 20 persen, maka tidak menutup kemungkinan akan membunuh sistem demokrasi di Indonesia.

“Memang 10 persen atau 15 persen, atau 20 persen itu istilahnya bisa membunuh demokasi dan menyia-nyiakan suara rakyat,” katanya.

Selain itu, kata Nasir, dengan adanya ambang batas presiden sebanyak 20 persen akan menutup kandidat calon presiden potensial untuk maju dalam kontestasi Pilpres lantaran perlu mendapat dukungan banyak partai politik.

“Itu juga terkesan menguntungkan para pemodal, menguntungkan orang yang punya kuasa uang dan tentu akan menyebabkan ke depan Inpres itu seperti 2019, ada polarisasi. Karena tingginya angka presidential threshold sehingga sulit untuk bisa menghasilkan banyak kandidat,” jelasnya.

“Oleh karena itu, kami berpikir memang ke depan harus dicermati oleh partai besar. Kita sudah punya pengalaman di 2019 di mana ada polarisasi yang begitu kuat dan tajam, dan sampai sekarang itu belum selesai,” tutupnya.



Legislator PKS Ingatkan Pilkada Jangan Jadi Klaster Baru Penyebaran Covid-19

Panwaslu di 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota perlu melakukan ekstra pengawasan. Apabila menemukan ada kegiatan dari para kandidat yang tidak mentaati protokol kesehatan harus segera ditegur dan dihentikan kegiatan tersebut. Kesehatan masyarakat harus menjadi prioritas dalam pelaksanaan pilkada 2020,

Dr. KH SURAHMAN HIDAYAT, M.A.

Anggota Komisi II DPR RI

Jakarta (07/09) — Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Surahman Hidayat, meminta semua pihak untuk mentaati protokol kesehatan dan mengingatkan agar jangan sampai Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) menjadi klaster baru dalam penyebaran covid-19.

Surahman menyampaikan bahwa Pilkada 2020 telah memasuki fase pendaftaran bakal pasangan calon kepala

daerah, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mencatat 243 pendaftaran bakal pasangan calon yang melanggar protokol kesehatan.

"Komisi Pemilihan Umum (KPU) perlu memastikan tahapan pilkada, khususnya pelaksanaan kampanye sampai dengan hari pencoblosan dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan. Apabila pilkada menjadi klaster baru penyebaran covid-19,

dampaknya sangat masif dan luas karena pilkada dilaksanakan di 270 daerah," ujar Surahman.

Surahman mengingatkan bahwa Panwaslu di 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota perlu melakukan ekstra pengawasan. Apabila menemukan ada kegiatan dari para kandidat yang tidak mentaati protokol kesehatan harus segera ditegur dan dihentikan kegiatan tersebut.

"Kesehatan masyarakat harus menjadi prioritas dalam pelaksanaan pilkada 2020," tegas Surahman.

Legislator Dapil Jawa Barat X ini juga meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk memastikan tersedianya dana protokol kesehatan untuk pelaksanaan pilkada 2020.

"Jangan sampai petugas dan tempat pemungutan suara yang ada tidak menerapkan protokol kesehatan dengan alasan tidak adanya dana," pungkas Surahman.



Jaga Ruang Digital Bersih pada Pilkada 2020

Legislator PKS: Sudah Seharusnya Negara Hadir

“Komitmen menjaga ruang digital agar tetap bersih dan sehat dalam pilkada adalah keharusan tetapi jangan juga menjadi kesempatan untuk membatasi dan menghalangi kandidat lain yang tidak sejalan dengan Pemerintah” tutur Teddy.

TEDDY SETIADI, S.Sos.

Anggota Komisi II DPR RI

Jakarta (06/09) — Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Teddy Setiadi, menanggapi Nota Kesepakatan Aksi (NKA) bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang pengawasan konten internet dalam menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020.

Teddy mengapresiasi langkah yang diambil oleh Menteri Komunikasi dan Informasi dalam komitmennya menjaga ruang digital yang sehat dan bersih.

Teddy menyampaikan bahwa negara memang seharusnya hadir dan adil

dalam menjaga ruang digital yang sehat dan bersih dalam pilkada 2020. Seharusnya bukan hanya dalam pilkada 2020 saja, tetapi dalam semua hal di kehidupan ruang digital kita sehari-hari harus juga dijaga.

Teddy mengingatkan agar komitmen menjaga ruang digital ini tidak disalah gunakan untuk membatasi atau menghalangi calon kepala daerah lain yang tidak sejalan dengan pemerintah.

“Komitmen menjaga ruang digital agar tetap bersih dan sehat dalam pilkada adalah keharusan tetapi jangan juga

menjadi kesempatan untuk membatasi dan menghalangi kandidat lain yang tidak sejalan dengan Pemerintah,” tutur Teddy.

Hal ini perlu menjadi perhatian karena banyaknya masukan dari masyarakat atas laporan-laporan konten-konten negatif, Konten SARA, konten mengudub domba, dan konten tidak sehat lainnya dalam ruang digital.

“Selama ini menurut aduan masyarakat, yang ditindaklanjuti adalah jika konten itu mengarah kepada pemerintah, sementara konten negatif yang mengarah kepada masyarakat umum atau di luar pemerintah tidak ditindaklanjuti bahkan cenderung diabaikan,” pungkas Teddy

Teddy berharap bahwa dengan adanya komitmen tersebut pilkada di tengah pandemi ini bisa berjalan dengan baik, terpilih pemimpin yang amanah, dan masyarakat tetap sehat.





FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA
Ketua Fraksi PKS DPR RI



Selamat dan Sukses

Atas terpilihnya

H. ADIAN HUSAINI, M.Si., Ph.D

Sebagai Ketua Umum

Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia (DDII)

Periode 2020 - 2025

Insiden di Polsek Ciracas

Adang Daradjatun Minta Semua Pihak Menahan Diri

Dengan kejadian ini, saya meminta seluruh pihak untuk menahan diri dan tidak terprovokasi oleh informasi yang tidak dapat dikonfirmasi terkait kebenarannya

Drs. H. ADANG DARADJATUN

Anggota Komisi III DPR RI

Jakarta (05/09) — Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Adang Daradjatun turut prihatin terhadap kasus penyerangan terhadap Polsek Ciracas dan sekitarnya pada Sabtu (29/08/2020) dinihari lalu.

Menurut Adang, kasus penyerangan ini diduga terjadi akibat adanya provokasi dan informasi tidak benar terhadap kecelakaan tunggal yang dialami Anggota TNI.

Kejadian menimpa salah seorang Anggota TNI berinisial Prada MI, di sekitar Jalan Kelapa Dua Wetan, Ciracas, Jakarta Timur, tepatnya di dekat

pertigaan lampu merah Arundina

"Dengan kejadian ini, saya meminta seluruh pihak untuk menahan diri dan tidak terprovokasi oleh informasi yang tidak dapat dikonfirmasi terkait kebenarannya," pinta Wakil Ketua Fraksi PKS ini.

"Kami ingin kedepan peristiwa serupa tidak terulang kembali, saya pribadi berharap agar semua pihak menahan diri dan cermat dalam menerima informasi. Untuk saat ini, kita patuh dan menghormati segala proses hukum yang sedang berlangsung", kata Adang mengakhiri.



Aleg PKS Soroti Implementasi Kebijakan Pupuk Bersubsidi yang Bermasalah

Saya mendorong Pemerintah perlu memperkuat peranan penyuluh Pertanian untuk terus melakukan sosialisasi program pemupukan yang efisien dan tepat sesuai dengan kadar kebutuhan hara tanah, dan supaya pemerintah tidak hanya sibuk dengan program kartu tani yang menyulitkan petani di berbagai daerah

H. JOHAN ROSIHAN, S.T

Anggota Komisi IV DPR RI

Jakarta (09/09) — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan, menyoroti masih banyaknya persoalan implementasi dari kebijakan pupuk bersubsidi yang berakibat merugikan petani dan sejumlah masalah lain mulai dari rendahnya verifikasi dan validasi data, persoalan distribusi pupuk dan banyaknya penyelenggaraan di lapangan yang berdampak pada kelangkaan pupuk di berbagai daerah.

Hal tersebut diungkapkan Johan pada saat menjadi salah satu narasumber pada diskusi public yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik, Universitas Gadjah Mada (UGM) secara virtual, Selasa, (08/09/2020) dengan topik meninjau ulang kebijakan pupuk bersubsidi di Indonesia.

Politisi PKS ini juga menyoroti mengenai semakin banyak konsumsi pupuk tidak berbanding lurus dengan peningkatan produktivitas Pertanian, maka ini menjadi tantangan dunia Pertanian di masa depan.

"Saya mendorong Pemerintah perlu memperkuat peranan penyuluh Pertanian untuk terus melakukan sosialisasi program pemupukan yang efisien dan tepat sesuai

dengan kadar kebutuhan hara tanah, dan supaya pemerintah tidak hanya sibuk dengan program kartu tani yang menyulitkan petani di berbagai daerah," papar Johan.

Legislator dari dapil NTB 1 ini menyampaikan bahwa saat ini perlu perbaikan manajemen distribusi pupuk bersubsidi agar lebih tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat guna demi peningkatan produktivitas Pertanian.

Johan berharap pemerintah mesti memberikan pencerahan kepada petani dengan konsep pemupukan berimbang lengkap, dengan cara memberi rekomendasi pupuk spesifik lokasi.

"Kombinasi pupuk organik dan anorganik serta redesign formula pupuk agar sesuai dengan kebutuhan tanaman", ujar Johan.

Wakil rakyat dari Pulau Sumbawa ini melihat bahwa jika pemerintah ingin meningkatkan produksi Pertanian ke depan, terutama pada masa pandemi ini, maka alokasi pupuk bersubsidi untuk petani mesti juga ditingkatkan dengan cara meningkatkan alokasi anggaran subsidi pupuk yang sesuai



dengan kebutuhan petani.

"Hal ini sebagai bentuk perlindungan kepada petani pada masa sulit ini supaya produksi Pertanian kita tetap meningkat, saya minta pemerintah memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi di setiap kios pada masa tanam ini serta membantu petani agar lebih bergairah melakukan penanaman," seru Johan.

Selanjutnya Johan juga mengkritik kinerja pemerintah dengan adanya situasi deficit atau kekurangan pupuk bersubsidi yang mengakibatkan kelangkaan pupuk di berbagai

daerah sehingga merugikan petani, demikian juga dengan kinerja pendistribusian kartu tani yang hanya mencapai 52% dari data e-RDKK selama tahun 2019 lalu, serta kartu tani yang digunakan baru mencapai 10% dari kartu tani yang terdistribusi.

"Pemerintah harus mengevaluasi kinerjanya karena jumlah penubasan pupuk bersubsidi dengan menggunakan kartu tani masih belum merata dari semua provinsi," tutup Johan.

Kejahatan Hutan Terstruktur dan Terorganisir

Politisi PKS: Hukum Harus Ditegakkan!

Perlu ada evaluasi besar-besaran pada implementasi kinerja KLHK pada bidang penegakan hukum kejahatan kehutanan ini. Jangan sampai salah sasaran pada rakyat kecil yang sekedar bertahan hidup di sekitar hutan, dengan dalih undang-undang di kriminalisasi. Padahal kejahatan yang terorganisir telah menimbulkan dampak kerusakan lingkungan yang begitu besar hingga skala negara

Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P.,M.M

Anggota Komisi IV DPR RI

Jakarta (09/09) — Anggota DPR RI Komisi IV dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin, meminta Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal GAKKUM Kementerian Kehutanan dan Lingkungan hidup agar semakin memfokuskan penegakan hukum kejahatan kehutanan yang dilakukan secara terorganisir dan terstruktur.

Data presentasi KLHK yang memaparkan terdapat 155 perkara pidana perorang-

an, 25 perkara pidana kelompok masyarakat dan 20 pidana badan Usaha merupakan bukti nyata bahwa kinerja penegakan kejahatan kehutanan masih belum tepat sasaran.

"Kita bisa mengurai Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Sangat jelas ruh penegakan hukum pada undang-undang ini untuk mengatasi kejahatan hutan

yang terstruktur dan terorganisir yang ditegakkan pada pasal 1 angka 6", urai Akmal.

Akmal melanjutkan, Perlu ada evaluasi besar-besaran pada implementasi kinerja KLHK pada bidang penegakan hukum kejahatan kehutanan ini. Jangan sampai salah sasaran pada rakyat kecil yang sekedar bertahan hidup di sekitar hutan, dengan dalih undang-undang di kriminalisasi.

"Padahal kejahatan yang terorganisir telah menimbulkan dampak kerusakan lingkungan yang begitu besar hingga skala negara", ungkapnya.

Akmal memberikan contoh, salah satu kejahatan besar yang merusak lingkungan skala negara adalah pembakaran hutan, lahan dan illegal logging.

"Kejahatan model seperti ini sangat kecil kemungkinannya dilakukan perorang. Bukan saja merugikan masyarakat, bahkan merugikan negara. Pada skala makro menimbulkan kerusakan lingkungan hidup secara global atau dunia", pungkasnya.

Legislator asal Sulawesi Selatan II ini meminta kepada



pemerintah agar upaya memberantas tindak pidana di bidang kehutanan terus dilakukan guna mereduksi dampak negatif yang timbul.

"Saya melihat ada beberapa kendala pada eksekusi penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang kehutanan. Salah satu faktor penghambat adalah faktor yuridis maupun non yuridis. Oleh karena itu faktor-faktor tersebut perlu mendapat perhatian Pemerintah agar penegakan hukum di bidang kehutanan pada masa mendatang dapat berjalan dengan baik", Jelas Akmal.

Politisi PKS ini mene-gaskan kepada Pemerintah,

jangan ada lagi penegakan hukum yang menasar rakyat kecil sekitar hutan. Masyarakat sekitar hutan ini perlu pembinaan yang bahkan nantinya akan menjadi garda terdepan melindungi hutan.

"Saya berharap, penegakan hukum di waktu-waktu berikutnya lebih menasar jaringan-jaringan terorganisir yang telah membuat hutan dan satwa Indonesia menjadi rusak dan punah. Jangan salah sasaran. Rakyat kecil yang mestinya dilindungi jangan sampai ada yang terkriminalisasi", tutup Andi Akmal Pasluddin.

Masih Pandemi, Legislator PKS Pertanyakan Program KLHK Soal Ibukota Baru

saat ini pemerintah memiliki fokus untuk melakukan akselerasi pemulihan ekonomi nasional. Oleh karena itu, sudah sepatutnya anggaran sebesar itu direlokasi untuk program-program yang mendukung pemulihan ekonomi nasional. Jadi jangan sampai masyarakat dinabobokan dengan pernyataan Kepala BAPPENAS bahwa rencana Ibukota baru dihentikan, tapi justru ada program semacam itu di KLHK,"

drh. H. SLAMET

Anggota Komisi IV DPR RI

Jakarta (09/09) — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS), Slamet, menyoroti salah satu program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang berkaitan dengan rencana Ibukota baru.

Slamet menyebut, terdapat satu program KLHK terkait pengembangan kawasan perkantoran di Ibukota baru yang memiliki anggaran sebesar

Rp 26,8 miliar.

"Kepala BAPPENAS sudah menyampaikan ke media bahwa program Ibukota baru itu dihentikan karena Covid-19. Nah lalu apa korelasinya di KLHK ada program seperti ini?," tanya Slamet saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan KLHK," ungkap Slamet.

Slamet menegaskan, saat ini pemerintah memiliki fokus untuk melakukan akselerasi pemulihan ekonomi nasional.

Oleh karena itu, sambung Slamet, sudah sepatutnya anggaran sebesar itu direlokasi untuk program-program yang mendukung pemulihan ekonomi nasional.

"Jadi jangan sampai masyarakat dinabobokan dengan pernyataan Kepala BAPPENAS bahwa rencana Ibukota baru dihentikan, tapi justru ada program semacam itu di KLHK," jelas Slamet.





RDP dengan Dirjen Bina Konstruksi, Syaikhu Sampaikan Evaluasi Kecelakaan Kontruksi

Dari tahun 2017 hingga 2019 ada saja kecelakaan konstruksi. Ini kan harus kita evaluasi secara menyeluruh dan mendalam

H. AHMAD SYAIKHU

Anggota Komisi V DPR RI

Jakarta (10/09) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Ahmad Syaikhu menyampaikan evaluasi terhadap seringnya terjadi kecelakaan konstruksi pembangunan jalan tol.

Syaikhu juga memberikan dukungan terhadap rencana pendirian Sekolah Vokasi Konstruksi.

Hal itu disampaikan Syaikhu saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, (09/09/2020).

Syaikhu memaparkan data tentang kecelakaan proyek jalan tol. Hampir setiap tahun ada masalah dengan konstruksi.

"Dari tahun 2017 hingga 2019 ada saja kecelakaan

konstruksi. Ini kan harus kita evaluasi secara menyeluruh dan mendalam," ujar Syaikhu.

Politisi PKS itu menambahkan, daftar kecelakaan proyek jalan tol antara lain

Pemalang-Batang, Pasuruan-Probolinggo, Becakayu, Desari yang mengalami dua kali ambruk dan BORR. Terakhir, Seksi IV Cibitung - Cilincing.

"Saya berharap, Dirjen Bina Konstruksi lebih powerful lagi dalam proses penilaian pengadaan barang dan jasa serta pengawasan yang lebih ketat lagi dalam pelaksanaan konstruksi," tegas Syaikhu.

Diharapkan, dengan cara itu akan meminimalisir kecelakaan konstruksi dengan menguatkan Standar K3 (Keamanan, Keselamatan dan Kesehatan).

"Kita ingin kecelakaan sejenis berkurang atau bahkan tidak ada sama sekali, zero accident" harap Syaikhu.

Mantan Wakil Walikota Bekasi itu memahami, mengatasi masalah ini memang tidak mudah. Salah satu kuncinya adalah kompetensi SDM. Oleh karena itu, mencetak SDM yang berkompeten menjadi suatu tuntutan yang mutlak.

"Ini kuncinya. Mencetak SDM kompeten. Dari pengadaan barang dan jasa, sistem manajemen keselamatan konstruksi, hingga pencegahan korupsi dan fraud. Di sinilah peran vital Dirjen Bina Konstruksi," ungkap Syaikhu.

Oleh karena itu, Syaikhu mendukung Program Sekolah Vokasi Konstruksi. Tujuannya agar ada penguatan SDM melalui pendidikan dan pelatihan.

"Saya dukung penuh sekolah ini. Agar SDM konstruksi lebih kompeten sehingga bisa mengatasi masalah kecelakaan pembangunan tol dan lainnya," tegas Syaikhu.





FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Pertamina Tidak Layak Rugi

Ada penyebab lain (selain yang disebut Direktur Keuangan PT Pertamina Emma Sri Martini .red) yang sangat membebani Pertamina. **Semuanya berpangkal pada kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan konstitusi, aturan dan prinsip good corporate governance (GCG),**

1 **Pertamina harus membayar signature bonus (SB) Blok Rokan sebesar US\$ 784 juta (sekitar Rp 11,3 triliun).** Padahal sesuai Pasal 33 UUD 1945, pengelolaan Blok Rokan adalah hak mandatory Pertamina.

2 **Pertamina harus membeli minyak mentah (crude) domestik dengan harga Indonesia Crude Price (ICP) lebih mahal sekitar US\$ 8 per barel (blok Banyu Urip) dan US\$ 11 per barel (blok Duri) dibanding ICP crude jenis lain.**

3 **Pertamina harus menanggung beban kebijakan populis menjelang Pilpres 2019, sehingga harus menanggung beban biaya subsidi BBM dan LPG sejak April 2017.**



Apabila kebijakan Pemerintah dalam pengelolaan PT Pertamina benar-benar sesuai konstitusi dan menerapkan prinsip-prinsip GCG PT Pertamina tidak rugi

Amin AK,M.M. Anggota Komisi VI DPR RI



Anggota FPKS Tegaskan Pertamina Tidak Layak Rugi

Akibat tiga kebijakan pemerintah yang disebutkan diatas beban keuangan SB Rokan Rp 11,3 triliun, beban membeli crude domestic mahal Rp 9,25 triliun, dan biaya bunga akibat kebijakan populis Pilpres 2019 Rp3 triliun

AMIN AK, M.M.

Anggota Komisi VI DPR RI

Jakarta (04/09) — Berdasarkan Laporan Keuangan semester I tahun 2020 PT Pertamina menderita kerugian sebesar US\$ 767.92 juta atau sekitar Rp11,33 triliun (kurs 1 US\$ = Rp14.766).

Hal tersebut merupakan kemunduran cukup signifikan dibanding periode yang sama tahun 2019 yang pada saat itu Pertamina melaporkan laba sebesar US\$ 659.96 juta atau setara Rp9,7 triliun.

Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR pada (26/08/2020) lalu, Direktur Keuangan PT Pertamina Emma Sri Martini menjelaskan ada tiga faktor utama yang menjadi penyebab kerugian Pertamina yaitu

turunnya harga minyak dunia, anjloknya kurs rupiah terhadap US\$ dan merosotnya permintaan BBM.

Harga minyak turun menyebabkan sektor hulu Pertamina merugi, sedangkan turunnya permintaan BBM akibat covid-19 menyebabkan sektor hilir merugi. Turunnya kurs berdampak pada tambahan beban keuangan, karena pembukuan Pertamina berbasis US\$.

Menanggapi penjelasan Direktur Keuangan PT Pertamina, Anggota komisi VI dari Fraksi PKS Amin Ak mengatakan bahwa yang menjadi masalah bukan hanya ketiga faktor tersebut yang menjadi penyebab kerugian

Pertamina.

"Ada penyebab lain yang sangat membebani Pertamina. Semuanya berpangkal pada kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan konstitusi, aturan dan prinsip good corporate governance (GCG)," ungkap Amin Ak.

Pertama, kata Amin, Pertamina harus membayar signature bonus (SB) Blok Rokan sebesar US\$ 784 juta (sekitar Rp 11,3 triliun). Padahal sesuai Pasal 33 UUD 1945, pengeluaran Blok Rokan adalah hak mandatory Pertamina. Hal yang lebih ruyum, meskipun baru mengoperasikan Rokan Agustus 2021, Pertamina harus membayar SB pada 2018/2019.

"Akibatnya Pertamina harus menerbitkan surat utang untuk membayar itu. Seharusnya cadangan blok Rokan diperhitungkan sebagai penyertaan modal negara (PMN), tanpa SB, dan berlaku sejak pengelolaan dimulai Pertamina Agustus 2021," beber Amin.

Kedua, lanjutnya, Pertamina harus membeli minyak mentah (crude) domestik dengan harga Indonesia Cude Price (ICP) lebih mahal sekitar US\$ 8



per barel (blok Banyu Urip) dan US\$ 11 per barel (Blok Duri) dibanding ICP crude jenis lain.

Hal ini terlihat dari Kepmen ESDM No.79.K/2020 tanggal 1 April 2020. Kepmen ini berlaku untuk ICP Maret 2020. Untuk bulan-bulan lain, antara Januari-Juni 2020, diperkirakan "anomali" perbedaan harga masih sama.

"Rerata produksi lapangan Banyu Urip sekitar 210.000 barel per hari (bph), sedangkan lapangan Duri sekitar 170.000 bph. Jika seluruh produksi minyak kedua daerah tersebut dibeli Pertamina, maka nilai "kemahalan" yang harus dibayar Pertamina (asumsi US\$/Rp=14.500, 1 semester = 180 hari) adalah US\$ 639 juta atau sekitar Rp 9,25 triliun. Nilai kemahalan atau kerugian

Pertamina di atas dihitung atas dasar 100% produksi Banyu Urip dan Duri dibeli oleh Pertamina," urainya.

Ketiga, umumnya, Pertamina harus menanggung beban kebijakan populis menjelang Pilpres 2019, sehingga harus menanggung beban biaya subsidi BBM dan LPG sejak April 2017.

Menurut Emma Sri Martini, akumulasi tanggungan Pertamina dari kebijakan tersebut adalah Rp96,5 triliun kompensasi dan Rp13 triliun subsidi, total Rp 109,5 triliun. Karena utang pemerintah Rp109,5 triliun baru dibayar Rp45 triliun pada 2020 Pertamina harus menerbitkan surat utang.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Aleg PKS: PEN harus Tetap Berjalan untuk UMKM, Bersamaan Fokus Tangani Covid-19

“Kebijakan yang relatif tepat dilakukan akan menahan serangan resesi dengan memperkuat pondasi ekonomi kerakyatan, seharusnya bisa berbarengan dengan fokus penanganan kesehatan.”

Hj. NEVI ZUAIRINA

Anggota Komisi VI DPR RI

Jakarta (05/09) — Anggota DPR Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Nevi Zuairina Mendukung Pemerintah untuk lebih fokus penyelesaian covid-19 dengan mengarahkan seluruh sumberdaya negara yang diarahkan pada pengendalian wabah ini.

Namun secara bersamaan, menurut Nevi, daya topang ekonomi kerakyatan yang selama ini melekak pada pelaku usaha UMKM berbagai sektor mesti menjadi perhatian khusus pemerintah.

Nevi menyarankan paket pengendalian Covid-19 dan Penyelamatan UMKM menjadi satu kesatuan yang terintegrasi.

"Kondisi negara Indonesia saat ini sudah berhadapan dengan krisis Ekonomi dunia akibat Covid-19. Saya menduga, bertahannya situasi

pembelanjaan rakyat masih relatif bergeliat terbantu pada moment pilkada dimana masyarakat pemilik sumberdaya dan uang tunai membelanjakan dananya yang secara tidak langsung meningkatkan peredaran uang di pasaran," ungkapnya.

Namun Nevi mengatakan, kondisi tersebut baru hipotesa saja yang bisa dibuktikan dengan riset yang lebih dalam sekaligus mendapatkan informasi akurat agar pemerintah memiliki berbagai skenario tindakan cepat yang berdasar data dan analisa, bukan berdasar kira-kira.

"Kebijakan yang relatif tepat dilakukan akan menahan serangan resesi dengan memperkuat pondasi ekonomi kerakyatan, seharusnya bisa

berbarengan dengan fokus penanganan kesehatan. Selama ini persoalan dasarnya adalah, daya serap anggaran yang telah ditetapkan pada penanganan covid-19 sangat minim jauh dari harapan yang berkisar hanya sekitar 19% atau Rp 135 triliun dari anggaran Rp 695,2 triliun di penghujung Juli 2020. Bila ini diteruskan kondisi seperti ini, gak akan selesai-selesai persoalan wabah ini", urai Nevi.

Politisi PKS ini meyakini bahwa Bantuan rakyat melalui PEN (Program Ekonomi Nasional) yang digelontorkan pemerintah dapat memperkuat ekonomi kerakyatan dengan berbagai pertimbangan.

"Ada ancaman menghadang negara ini bila pilkada serentak sudah selesai, yakni jurang resesi dan krisis sosial yang selalu di gaungkan oleh berbagai pihak dengan berbagai alasan," pungkasnya.

Tapi menurut Nevi, Negara ini masih bisa terselamatkan apabila Pemerintah disiplin fokus persoalan kesehatan dengan porsi besar berbarengan dengan penyelamatan Ekonomi Nasional (PEN) yang berfokus



pada UMKM.

Nevi mengatakan, pihaknya menerima berbagai masukan dari berbagai pakar yang terus mengungkap pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terus negatif. Dampak yang tak terduga dan relatif tiba-tiba dapat terjadi yang memicu krisis sosial akan menjadi bencana besar bagi bangsa ini.

"Saat ini kita akan sulit berkomunikasi dengan negara luar. Negara kita terburuk

nomor 4 di dunia dalam penanganan covid-19. Dengan penambahan kasus sekitar 3.000 orang lebih dalam sehari menjadi sorotan dunia negara ini tidak serius pada pengendalian wabah. Negara luar hanya bisa menilai dan menjadi kesimpulan buat mereka bahwa Indonesia tidak dapat di dekati dalam arti kita sudah di Blacklist", ujar Nevi.

Wakil Ketua FPKS: Pemerintah Jangan Terlalu Memanjakan Smelter Asing

sudah saatnya Pemerintah meninjau berbagai insentif dan kemudahan berusaha tersebut agar lebih efisien dan proporsional. Smelter adalah fasilitas pengolahan/pemurnian hasil tambang menjadi produk yang lebih bernilai tambah tinggi

Dr. H. MULYANTO, M.Eng

Anggota Komisi VII DPR RI

Jakarta (08/09) — Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, mengingatkan Pemerintah agar tidak memanjakan investor smelter asing dengan berbagai insentif dan kemudahan.

Menurut Mulyanto sudah saatnya Pemerintah meninjau berbagai insentif dan kemudahan berusaha tersebut agar lebih efisien dan proporsional.

"Smelter adalah fasilitas pengolahan/pemurnian hasil tambang menjadi produk yang lebih bernilai tambah tinggi," ungkap Mulyanto.

Mulyanto menjelaskan

secara konseptual program hilirisasi produk tambang melalui smelter ini harusnya melahirkan efek berlapis (multiflier effect) bagi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.

"Diharapkan keberadaan smelter asing tersebut dapat memunculkan produk turunan yang bernilai seperti emas, perak, kabel dan asam sulfat", tutur Anggota Komisi VII ini.

Selain itu, lanjutnya, keberadaan smelter bisa membangkitkan usaha rantai pasok meliputi tumbuhnya industri terkait di hilir, terbukanya lapangan kerja baru, peningkatan

keterampilan SDM dan alih teknologi dalam negeri, dll.

"Sementara hasil akhir yang kita ekspor adalah produk nikel bernilai tambah tinggi, bukan lagi biji tambang. Harapannya dalam jangka panjang, neraca transaksi perdagangan kita akan bisa dikoreksi positif," papar Wakil Ketua FPKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan ini.

Karena itu, menurut Mulyanto, jangan sampai program hilirisasi, yang secara konseptual sudah bagus ini, tercedera dan dinilai boros kemudahan.

"Iming-iming kemudahan bagi investor asing ini jangan terlalu berlebihan. Sementara manfaatnya tidak terlihat oleh masyarakat," tegas Mulyanto.

"Untuk itu Pemerintah harus mendorong sisi manfaat bagi publik dengan masuknya investor smelter asing tersebut. Agar harapan masyarakat dan tujuan pembangunan smelter ini, mewujudkan bagi mereka," imbuhnya.

Mulyanto minta



Pemerintah lebih serius dan fokus mendorong sisi manfaat hilirisasi hasil tambang melalui kehadiran smelter asing ini.

Bila tidak, maka kesan yang ditangkap masyarakat adalah sekedar pemanjangan terhadap investor asing melalui insentif harga bijih tambang yang sangat murah, bebas PPH badan selama 25 tahun, mendatangkan TKA dengan visa turis dll.

Apalagi datangnya ratusan TKA tersebut berasal dari Negara dengan wabah Covid-

19. Hal ini dikhawatirkan semakin membuat masyarakat risau.

"Masyarakat ingin melihat dan merasakan sisi manfaat keberadaan smelter asing itu bagi peningkatan kehidupan ekonomi mereka. Bukan sekedar menjadi pengamat terhadap proyek besar dengan banyak tenaga kerja di atas tanah mereka. Poin ini yang perlu diisolialisasikan dan digesa Pemerintah," tandas Mulyanto.

Soal Radikalisme **Menag Jangan Asal Bicara!**

"Cara paham radikal masuk adalah melalui orang yang berpenampilan baik atau good looking dan memiliki kemampuan agama yang bagus. Si anak 'good looking' ini!"

Pernyataan Menag Fachrul Razi dalam Webinar Menpan- RB



JAZULI JUWAINI
Ketua Fraksi PKS DPR RI

Tidak Paham Peta Masalah

Ini menunjukkan menteri agama tidak paham peta masalah kebangsaan dan denyut nadi keberagaman khususnya umat Islam. Akibatnya salah dalam mengambil kesimpulan.

Lebih Baik Fokus tupoksinya

Lebih baik menteri agama Introspeksi diri dan berbenah ke dalam. Fokus pada tupoksinya memperbaiki kualitas Madrasah dan Penyuluh Agama karena inilah ujung tombak untuk memerangi radikalisme"



NURHASAN ZAIDI
Anggota Komisi VIII DPR RI

Harusnya Menag Berterima Kasih Kepada mereka

Harusnya Menteri Agama berterima kasih kepada anak-anak muda itu, menyambut positif trend mereka yang good looking yang hijrah, bisa bahasa arab, apalagi hafidh (penghafal) Al Quran yang memakmurkan masjid dan mau mengurus masjid

Tarik semua tuduhan tak mendasar

Menag sudah semestinya menarik semua tuduhannya yang tak mendasar. Sebab itu sangat menyakitkan dan mencederai perasaan umat Islam yang sudah punya andil besar dalam memerdekakan negara ini dan mengisi kemerdekaan dengan karya nyata



ISKAN QOLBA LUBIS
Anggota Komisi VIII DPR RI



HIDAYAT NURWAHID
Anggota Komisi VIII DPR RI

Anggota Komisi VIII DPR Peringatkan Menag untuk Pertimbangkan Setiap Ucapan

“Apa yang dia sampaikan itu kan, sudah tentu melukai perasaan umat Islam. Sekarang kami tanya, ada gak dia punya data-data yang akurat tentang radikalisme di Indonesia? Dari mana hubungannya orang yang good looking dan Hafiz Alquran punya bibit radikalisme?”

H. ISKAN QOLBA LUBIS, M.A.

Anggota Komisi VIII DPR RI

Jakarta (06/09) — Menteri Agama Fachrul Razi tengah menjadi sorotan menyusul pernyataannya tentang agen radikalisme.

Dia menyebut paham radikal bisa masuk melalui mereka yang berpenampilan menarik alias good looking. Hal itu diungkapkan Menag saat menjelaskan tentang paham radikal di lingkungan ASN yang harus diwaspadai.

Menag menyatakan bila tidak diseleksi dengan baik, khawatir benih-benih atau pemikiran-pemikiran radikal itu

akan masuk ke pemikiran ASN.

Resah dengan polemik tersebut, Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Iskan Qolba Lubis memperingatkan menteri agama agar mempertimbangkan setiap ucapan yang keluar dari lisannya.

“Apa yang dia sampaikan itu kan, sudah tentu melukai perasaan umat Islam. Sekarang kami tanya, ada gak dia punya data-data yang akurat tentang radikalisme di Indonesia?”

Dari mana hubungannya orang yang good looking dan Hafiz Alquran punya bibit

radikalisme?” tanya Iskan.

Malah kalau seperti ini terus, lanjutnya, terkesan Menteri Agama ini selalu memojokkan Agama Islam.

“Diawal jabatannya dia katakan larangan bercadar, dengan alasan keamanan. Kemudian Oktober 2019, celana cingkrang juga tak luput dari perhatiannya. Menag Fachrul katakan pada saat itu penggunaan celana cingkrang tak sesuai aturan berseragam di lingkungan instansi

Pemerintah, bahkan dia menyebut lebih baik PNS ber celana cingkrang keluar dari instansi Pemerintahan jika tak mengikuti aturan.” Tegas iskan

Usai cadar dan celana cingkrang berlaru, Menteri Agama Fachrul Razi kembali mengeluarkan pernyataan yang menimbulkan kontroversi.

Dalam acara webinar bertajuk ‘Strategi Menangkal Radikalisme Pada Aparatur Sipil Negara’, yang disiarkan di YouTube KemenPAN-RB, Rabu (02/09/2020), dia menyebut paham radikal masuk melalui



orang yang berpenampilan baik.

“Cara masuk mereka gampang, pertama dikirimkan seorang anak yang good looking, penguasaan bahasa Arab bagus, hafiz, mulai masuk, ikut-ikutan jadi imam, lama-orang orang situ bersimpati, diangkat jadi pengurus masjid. Kemudian mulai masuk temannya dan lain sebagainya, mulai masuk ide-ide yang tadi kita takutkan,” ucapnya pada saat itu.

Ucapan ini menuai kontroversi tentunya. Iskan meminta agar Menag Fachrul Razi tidak menggeneralisasi situasi pada keadaan tertentu.

“Bahwa paham radikalisme bisa muncul dari orang-orang yang good looking dan hafiz Quran, ini tidak lah tepat. Kalau memang konteksnya tentang menangkal radikal-

isme yang lahir dari mesjid-mesjid perkantoran BUMN dan lingkungan pemerintahan, Menag bisa saja membuat langkah mitigasi dengan cara berkolaborasi dengan NU dan Muhammadiyah bahkan MUI untuk memberikan rekomendasi BKM yang tepat bagi mesjid tersebut, bukannya malah mengeluarkan kalimat yang tidak berdasar seperti ini.” urainya.

Politisi PKS asal Sibuhuan ini meminta agar Menag menarik semua tuduhannya yang tak mendasar.

“Sebab itu sangat menyakitkan dan mencederai perasaan umat Islam yang sudah punya andil besar dalam memerdekakan negara ini dan mengisji kemerdekaan dengan karya nyata,” pungkasnya mengakhiri.

HNW: Harusnya Menag Tak Lanjutkan Sertifikasi Penceramah!

tolok ukur sertifikasi ini sangat tidak jelas dan tidak pernah disosialisasikan/diujikan publik, untuk hadirkan hasil obyektif yang dipercaya oleh publik/Umat.

Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A

Anggota Komisi VIII DPR RI

Jakarta (07/09) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid meminta Kementerian Agama menyudahi kontroversi sertifikasi penceramah yang tidak produktif dan justru menimbulkan keresahan dan polemik, serta memicu penolakan oleh masyarakat luas seperti Muhammadiyah, MUI (Sekum), bahkan ditolak oleh Tokoh Non Muslim seperti Christ Wamena dll.

Menurut pria yang akrab disapa HNW, pemunculan program yang kontroversial, tidak adil, dan tendensius tersebut sangat tidak tepat di tengah keprihatinan umat dan bangsa yang sedang tertimpa musibah Covid-19, dan pernyataan-pernyataan Presiden Jokowi agar semua pihak fokus dan sibuk mengurus covid-19.

Sekalipun saya setuju

untuk terus mengarus-utamakan ceramah dan laku Agama yang moderat/wasathiyah, tidak radikal/tathoruf, dan orientasinya hadirkan rahmatan lil alamin, yang mestinya Menag dan Kemenag memberikan keteladanan lebih dulu, bukan dengan mewacanakan sertifikasi. Apalagi program yang kontroversial itu juga bisa hadirkan keresahan sosial di kalangan Umat, yang tidak membantu hadirkan penguatan imunitas untuk atasi Covid-19", disampaikan Hidayat dalam keterangan tertulis di Jakarta (07/09).

Hidayat yang juga anggota DPR-RI Komisi VIII ini mengkritisi dan mengingatkan, bahwa program sertifikasi penceramah tidak pernah muncul dalam program kerja maupun prioritas rencana Kerja Kementerian Agama beserta

anggarannya yang disampaikan Kemenag ke DPR. Karenanya program ini juga belum pernah dibahas dan disetujui oleh komisi VIII DPR-RI.

Wakil Ketua MPR RI ini juga mempertanyakan Kemenag yang sangat bersemangat menggulirkan wacana ini dan membuat nya seolah-olah program yang sangat prioritas, tetapi tak pernah mengajukannya sebagai program apalagi program kerja prioritas.

Padahal sejak dari awal raker Menag dengan komisi VIII DPR, selalu saja DPR mengkritik keras dan menolak wacana soal 'radikalisme yang tak ada definisi dan ukurannya' yang diwacanakan oleh Menag. Tapi sejak itu pun, tak pernah Kemenag menyampaikan program prioritas maupun non prioritas terkait sertifikasi penceramah dikaitkan dengan isu radikalisme, untuk dibahas dan disetujui oleh komisi VIII DPR-RI.

"Lantas, bagaimana program ini bisa muncul dan dilaksanakan? Bagaimana legalitasnya? Siapa yang membiayainya? Untuk kepentingan apa dan siapa?", ujar Hidayat.

Menurutnya, jika memang



tujuan sertifikasi adalah untuk penyuluhan dan pembekalan, selama ini Kemenag bekerja sama dengan MUI telah memiliki program pembekalan penyuluh. Sertifikasi penceramah yang demikian banyak apalagi melibatkan berbagai lembaga negara (BNPT, BPIP dll) juga bukan hal yang mudah dan murah, mengingat misalnya Kemenag dalam melakukan sertifikasi dosen dan guru saja masih memiliki banyak kendala dan masalah, apalagi dengan terbatasnya anggaran negara

akibat merosotnya penerimaan pajak, dan kebijakan umum untuk realokasi anggaran agar difokuskan pada penanganan covid-19.

HNW mengkhawatirkan, pelibatan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam proyek sertifikasi ini akan memunculkan stigma radikal dan tidak pancasilais pada penceramah yang tidak bersertifikat.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Raker dengan Mensos

PKS Usulkan Subsidi Kuota Internet bagi Pelajar Selama Pandemi

“Terkait bantuan pulsa atau paket internet ini penting bagi putra putri kita, Pak Mensos. Meskipun Kemendikbud telah mencairkan dan Kementerian Agama telah menjanjikan, kendati yang terakhir ini belum jelas posisinya, saya yakin model bantuan pulsa/ paket data internet dari Kemensos ini akan memiliki andil besar dalam rangka mewujudkan tujuan nasional kita, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa”

KH. BUKHORI, Lc., M.A.

Anggota Komisi VIII DPR RI

Jakarta (04/09) — Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Bukhori Yusuf mengapresiasi kinerja Menteri Sosial Juliani Batubara atas performa cukup baik yang ditunjukkan oleh Kemensos selama penanganan pandemi meskipun masih memiliki sejumlah catatan merah yang perlu diperbaiki.

Bukhori menilai Kementerian Sosial merupakan salah satu Kementerian yang

berperan optimal dalam hal realisasi anggaran sesuai domainnya di bidang perlindungan sosial.

“Saya harus sportif, siapapun yang mampu menunjukkan prestasi maka harus diapresiasi. Secara politik, walaupun kami (red. PKS) mengambil posisi di luar kekuasaan, akan tetapi kami memiliki kepentingan agar pemerintah ini sukses. Sebab, apabila pemerintah ini sukses,

maka yang menikmati adalah rakyat. Sedangkan jika gagal, yang menderita pun adalah rakyat” ungkapnya saat Rapat Kerja bersama Menteri Sosial di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (03/09/2020).

Kemensos memperoleh anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari Menteri Keuangan sebanyak Rp 127 Triliun. Sejak pandemi berlangsung sampai saat ini, Kementerian Sosial telah berhasil membelanjakan anggarannya sebesar Rp 83,3 Triliun atau setara dengan (65,52%).

Mensos mengklaim, angka realisasi ini menjadikan Kementerian Sosial sebagai Kementerian dengan serapan tertinggi di antara Kementerian yang lain selama penanganan pandemi.

Selain memberikan apresiasi, tidak lupa Anggota Baleg dari Fraksi PKS ini turut memberikan catatan kritis terkait temuan di sejumlah daerah berkenaan dengan penyelewengan terhadap program Bantuan Pangan NonTunai (BPNT).

Bukhori meminta Mensos



lekas menyikapi isu daerah ini secara serius dengan menyusun strategi pengawasan yang efektif, akuntabel, dan berdampak terkait distribusi bantuan sampai ke tingkat hilir.

“Saya menerima laporan kejanggalan di sejumlah daerah. Misalnya, ada kelompok warga yang menyatakan mereka seolah dipaksa oleh oknum pejabat daerah untuk membeli daging beku seberat ½ kilogram seharga Rp 60.000,- di e-Warong yang telah ditunjuk otoritas setempat” paparnya.

Pasalnya, lanjutnya, pors

protein tidak harus ditetapkan secara rigid ½ kg dan tidak harus daging semata sebagai sumber protein.

“Sebab dalam Pedoman Umum Program Sembako Tahun 2020 dijelaskan, E-Warong tidak boleh menjual bahan pangan dengan sejenis dan jumlah yang telah ditentukan sepihak atau pihak lain sehingga KPM tidak memiliki pilihan. Apabila terbukti melanggar, E-Warong tersebut akan dicabut izinnya oleh Bank Penyalur,” sambungnya.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

*You Stay At Home,
We Stay At Parliament*



Bersama dengan Kemenkes, Komisi IX DPR Adakan Kegiatan KEI

Kita mengenal istilah, lebih baik mencegah dari pada mengobati, dan kami harap ini menjadi motivasi bagi kemenkes dalam melaksanakan program KEI, apalagi sekarang banyak sekali produk dan alat kesehatan yang beredar

H. ALIFUDDIN, S.E.,M.M

Anggota Komisi IX DPR RI

Pontianak (05/09) — Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bekerja sama dengan Komisi IX mengadakan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), di Aula Kanwil Dapag JI Sutan Sy Abdurrahman, Pontianak, Sabtu (05/09).

Alifudin, Anggota Komisi IX DPR RI, mengatakan program KIE merupakan hasil kerjasama antara Kemenkes dengan Komisi IX dalam rangka memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kesehatan.

"Salah satu mewujudkan masyarakat yang sehat, bisa melalui cara memberikan informasi yang benar kepada masyarakat tentang produk kesehatan, alat kesehatan (alkes), serta juga ada edukasi kemasyarakat agar terbentuk

pemahaman yang benar tentang produk dan alat kesehatan," ujarnya.

Alifudin juga berharap program KIE ini bisa diperluas dan dimassifkan karena penting bagi masyarakat, jangan sampai ada masyarakat yang salah dalam menggunakan alat dan produk kesehatan.

"Kita mengenal istilah, lebih baik mencegah dari pada mengobati, dan kami harap ini menjadi motivasi bagi kemenkes dalam melaksanakan program KEI, apalagi sekarang banyak sekali produk dan alat kesehatan yang beredar," tambahnya di depan peserta KIE.

Deni Herdiana, Kepala Seksi Alkes Kelas B Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Kemenkes RI

menjelaskan banyaknya alkes yang beredar harus dibarengi dengan pengetahuan dari masyarakat.

"Banyaknya iklan penjualan berbagai alkes bisa membuat masyarakat termotivasi untuk membeli, masalahnya apakah masyarakat tahu bahwa produk yang diiklankan itu benar benar merupakan produk kesehatan, atau bukan, nah ini pentingnya program KIE, agar bisa memberikan informasi yang benar kepada masyarakat," ujarnya.

Deni juga menambahkan agar masyarakat menggunakan Alkes dan PKRT dengan benar.

"pastikan ada izin edar dari kemenkes, petunjuk penggunaan, keamanan kemasan, tempat menyimpan jauhkan dari anak anak, ekonomis sesuai dengan kebutuhan, jangan mudah percaya dengan alkes atau produk kesehatan yang diiklankan dengan klai berlebihan," pungkasnya.



Aturan BPJS Merugikan Terapis Wicara

Politisi PKS: Kami Akan Advokasi

Melihat operasionalisasi di lapangan, aturan baru dari BPJS Kesehatan ini cenderung tidak mengapresiasi kompetensi profesi terapis wicara, mengurangi kualitas pelayanan medis bagi pasien, dan ada tumpang tindih peraturan yang terjadi

Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.

Anggota Komisi IX DPR RI

Jakarta (04/09) – Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati, menerima aspirasi dari perwakilan Ikatan Terapis Wicara Indonesia (IKATWI), IOTI (Ikatan Okupasi Terapis Indonesia), dan Ikatan Fisioterapia Indonesia (IFI) pada momen Hari Aspirasi F-PKS melalui platform Zoom di Jakarta, Jumat (04/09/2020).

Mufida dalam sambutannya menekankan bahwa Fraksi PKS selalu membuka kesempatan aspirasi dan masukan dari beragam elemen masyarakat.

"Kami dari Fraksi PKS senantiasa berkomitmen untuk berkhidmat kepada rakyat. Maka dari itu, kami membuka ruang aspirasi bagi masyarakat di setiap hari Selasa dan Jumat.

Setiap aspirasi yang masuk akan kami tampung dan catat, lalu kami teruskan kepada seluruh stakeholder yang terkait", terang Mufida.

Dalam kesempatan tersebut, perwakilan IKATWI, Waspada, menyampaikan keluhan mereka terhadap Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Prosedur Penjaminan Operasi Katarak dan Rehabilitasi Medik dalam Program Jaminan Kesehatan, yang dinilai berdampak pada menurunnya kualitas dan kuantitas layanan kesehatan untuk terapi wicara.

"Melihat operasionalisasi di lapangan, aturan baru dari BPJS Kesehatan ini cenderung tidak mengapresiasi kompetensi profesi terapis wicara, mengurangi kualitas

pelayanan medis bagi pasien, dan ada tumpang tindih peraturan yang terjadi", jelas Waspada.

Menanggapi keluhan ini, Mufida menerangkan bahwa ia bersama Anggota Komisi IX dari F-PKS lainnya akan mengawal dan mengadvokasi aspirasi tersebut.

"Kami akan mempelajari laporan ini lebih lanjut, dan menyandingkannya dengan beragam peraturan lain. Nantinya, kami akan suarakan ini saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama BPJS. Kami juga akan konsultasi-Osikan kepada Kemenkes", jelas Mufida.

Lebih lanjut, Mufida menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan kesehatan yang diambil pemerintah dan BPJS harus memenuhi rasa keadilan untuk semua pihak.

"BPJS Kesehatan harus mampu menjamin hak kesehatan seluruh rakyat, sekaligus mengapresiasi kompetensi tenaga medis yang berperan dalam pelayanan kesehatan", ucap Mufida.



Fraksi PKS Ingatkan Pentingnya Kedaulatan Vaksin

“Bentuk dukungan pemerintah harus dalam bentuk ril agar riset dan penelitiannya tidak berhenti meski datang vaksin lain yang dibawa oleh negara yang lain. Apalagi sudah dilakukan pembahasannya dalam rapat terpadu Pemerintah, DPR RI dan stakeholder, sudah dipresentasikan vaksin buatan dalam negeri bernama vaksin Merah Putih

Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si

Anggota Komisi IX DPR RI

Jakarta (08/09) – Ketua Tim Covid-19 Fraksi PKS DPR RI, Netty Prasetyani, mengingatkan kepada pemerintah tentang pentingnya kedaulatan vaksin dalam penanganan pandemi Covid-19. Hal ini disampaikan dalam Webinar Covid-19 FPKS bertajuk ‘PKS Menjaga Indonesia: Kedaulatan Vaksin, Kedaulatan Rakyat’, di Jakarta, Selasa (08/09).

Menurut Netty, pemerintah harus serius dalam upaya penciptaan vaksin dalam negeri ditengah gempuran vaksin-asin

“Bentuk dukungan pemerintah harus dalam bentuk ril agar riset dan penelitiannya tidak berhenti meski datang vaksin lain yang dibawa oleh negara yang lain. Apalagi sudah dilakukan pembahasannya dalam rapat terpadu Pemerintah, DPR RI dan stakeholder, sudah dipresentasikan vaksin buatan dalam negeri bernama vaksin Merah Putih,” urai Anggota Komisi IX DPR RI ini.

Netty pun mewanti-wanti pemerintah soal potensi persaingan perusahaan yang

mengimpor dan menjual vaksin, sehingga dikhawatirkan Indonesia hanya menjadi pasar semata. Menurutnya, hal ini sangat perlu untuk diantisipasi.

“Kedepannya diperlukan regulasi yang jelas terkait penyebaran vaksin ini, jika tidak maka akan berlaku pasar bebas harga vaksin. BUMN produsen vaksin dan antisera PT Bio Farma harus berada di garda terdepan menjaga alur distribusi vaksin yang berkeadilan dan tepat sasaran”, ucap Netty.

Di sisi lain, lanjut Netty, upaya pemerintah untuk membuat vaksin sendiri dan bekerja sama dengan perusahaan dari luar negeri jangan sampai dianggap sebagai jurus satu-satunya dalam menangani Covid-19.

“Pemerintah sudah sering menyampaikan isu vaksin ini kepada publik. Membangun optimisme rakyat. Justru yang harus menjadi perhatian, pemerintah jangan abai mensosialisasikan protokol kesehatan guna pencegahan dan penularan. Jika masyarakat berperilaku longgar, akan semakin sulit mengendalikan penyebaran virus”, jelasnya.



Ekonomi Kreatif Harus Jadi Arus Utama Pembangunan

“Sektor ekonomi kreatif menciptakan lapangan kerja baru yang berpihak pada nilai seni, budaya Bangsa Indonesia, atau sumber daya ekonomi lokal. Untuk itu, perlu mengarusutamakan ekonomi kreatif dalam rencana pembangunan nasional,”

Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH, MM

Wakil Ketua Komisi X DPR RI

Sektor ekonomi kreatif harus dihidupkan kembali berdampingan dengan sektor pariwisata. Selama pandemi virus Corona (Covid-19), sektor ini sempat menurun tajam. Untuk itu, perlu menjadikan ekonomi kreatif bagian dari arus utama (mainstream) pembangunan nasional.

Demikian mengemukakan dalam rapat dengar pendapat umum Komisi X DPR RI dengan para pelaku ekonomi kreatif, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (7/9/2020). Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih saat memimpin rapat tersebut mengatakan, sektor ini bisa menyerap banyak tenaga kerja yang berpihak pada nilai seni,

budaya Bangsa Indonesia, dan sumber ekonomi lokal.

“Sektor ekonomi kreatif menciptakan lapangan kerja baru yang berpihak pada nilai seni, budaya Bangsa Indonesia, atau sumber daya ekonomi lokal. Untuk itu, perlu mengarusutamakan ekonomi kreatif dalam rencana pembangunan nasional,” papar Fikri. Selama pandemi Covid-19, ekonomi kreatif dan pariwisata secara bersamaan terpuruk.

Politisi PKS ini menyampaikan, para pelaku ekonomi kreatif sengaja diundang Komisi X DPR RI tidak saja untuk memberi masukan, tapi juga perspektif lain bagaimana harus menumbuhkan dan menggeliatkan kembali sektor ekono-

mi kreatif. Banyak masalah yang dihadapi para pelaku ekonomi kreatif, diantaranya masalah klasik pembiayaan yang sebelum Covid-19 pun sudah bermasalah.

“Komisi X hadir untuk memperkuat kembali industri ekonomi kreatif. Upaya yang kami lakukan adalah berangkat dari beberapa masalah pokok terkait ekonomi kreatif. Perlu penguatan bersama, di antaranya soal pembiayaan. Bagaimana akses terhadap pembiayaan ekonomi kreatif yang sebelum Covid-19 masih jadi kendala. Tidak ada pelaku ekonomi kreatif yang difasilitasi perbankan. Rata-rata tidak punya agunan,” ungkap Fikri.

Mestinya, lanjut Fikri, pembiayaan bagi para palaku ekonomi kreatif bisa dibantu dengan agunan berbasis hak kekayaan intelektual. Belum lagi pemasaran produknya juga masih ditemukan hambatan di sana sini. Di sinilah pentingnya menyertakan para pelaku ekonomi kreatif dalam paradigma pembangunan nasional. (mh/sf)



Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih saat memimpin rapat dengar pendapat umum Komisi X DPR RI dengan para pelaku ekonomi kreatif, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (7/9/2020). Foto : dpr.go.id

Ledia Hanifa Ingatkan Sektor Pariwisata Masih Kekurangan SDM Berkualitas

“Sejak awal, persoalan SDM Pariwisata kita itu kan sangat terbatas, kekurangan dalam hal jumlah dan kualitasnya. Maka adanya peningkatan pagu tambahan 88%, yang menunjukkan keinginan untuk melakukan peningkatan program, adalah bagus. Hanya saja perlu benar-benar tepat arah dan rencana program agar menghasilkan SDM Pariwisata yang berkualitas

Hj. LEDIA HANIFA A, S.Si., M.Psi.T

Anggota Komisi X DPR RI

Jakarta (07/09) — Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengalokasikan penambahan anggaran 88,3% atau sekitar 466 Miliar Rupiah untuk program pendidikan dan pelatihan vokasi dalam pagu anggaran RAKAKL 2021.

Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Ledia Hanifa Amaliah mengingatkan, agar Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bisa mengambil langkah-langkah

yang tepat untuk meningkatkan kualitas SDM Pariwisata.

“Sejak awal, persoalan SDM Pariwisata kita itu kan sangat terbatas, kekurangan dalam hal jumlah dan kualitasnya. Maka adanya peningkatan pagu tambahan 88%, yang menunjukkan keinginan untuk melakukan peningkatan program, adalah bagus. Hanya saja perlu benar-benar tepat arah dan rencana program agar menghasilkan

SDM Pariwisata yang berkualitas,” ungkap Ledia. Ledia kemudian memaparkan bagaimana di dapilnya, Kota Bandung, problem terkait SDM Pariwisata ini kerap mengemuka.

“Contoh saja Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Bandung itu hampir setiap tahun mengadakan semacam job fair tetapi melaporkan bahwa setiap tahun pula lowongan-lowongan yang ada ternyata hanya terisi sekitar 60% nya saja. Jadi antara posisi yang tersedia dengan jumlah SDM yang memenuhi kualifikasi ternyata ada kesenjangan cukup besar,” ujar Sekretaris Fraksi PKS DPR RI ini.

Padahal, sambung Ledia, pada acara tersebut pihak penyelenggaraan sudah membuka booth khusus bagi para penyandang disabilitas, dengan menyediakan sejumlah posisi yang akan diberikan kepada para penyandang disabilitas dengan kualifikasi sesuai disabilitasnya tapi tetap juga masih banyak menyisakan



kekosongan posisi.

Aleg FPKS ini kemudian mengingatkan Kemenparekraf agar melakukan peningkatan kualitas SDM Pariwisata terutama yang berada di Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Kementerian Parekraf.

“Karena ini menyangkut soal vokasi, maka aspek praktek harus lebih kuat. Soal bahasa misalnya, seringkali dicurahkan para pemandu wisata menjadi satu persoalan mendasar yang membuat mereka kalah bersaing dengan pemandu wisata asing. Sangat memprihatinkan ketika turis asing datang berombangan

dipimpin oleh pemandu wisata dari negara mereka sendiri tanpa melibatkan pemandu wisata lokal karena alasan kesulitan bahasa. Maka pelatihan bahasa harus ditingkatkan dalam tataran praktek bagi para SDM calon pegiat pariwisata. Ini tentu membutuhkan rencana program vokasi yang sangat jelas, terukur dan fokus mengarah pada peningkatan kualitas kepariwisataan,” pungkasnya.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

PKS Tolak Kenaikan Bea Materai

Fraksi PKS tidak sependapat terkait Pasal 32 RUU Bea Meterai yang menyatakan bahwa Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021. Hal ini akan menjadi beban baru bagi rakyat dan perekonomian, ditengah dampak berat perekonomian akibat pandemi Covid-19 belum dapat diyakini berakhir atau selesai.

Fraksi PKS Menjadi satu-satunya Fraksi di DPR RI yang menolak rencana kenaikan Bea Materai. Hal ini dinyatakan dalam pembacaan pandangan akhir mini Fraksi PKS pada rapat kerja Komisi XI dengan Menteri Keuangan RI dan Menteri Hukum RI dan HAM terkait Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Bea Materai (03/09).

- 1 Saat ini Indonesia berada di jurang resesi.
- 2 Kenaikan Bea Cukai berpotensi semakin melemahkan daya beli masyarakat & menjadi beban baru bagi perekonomian.
- 3 Angka kemiskinan melonjak tajam pada Maret 2020 menjadi 26,42 jiwa (naik 1,63 jiwa) dalam 6 bulan.
- 4 Kenaikan 70% Bea Materai dari tarif tunggal Rp 6 ribu ke Rp 10 ribu serta batas transaksi hanya pada Rp 5 juta masih mencederai asas dan filosofi keadilan pajak.
- 5 Perluasan dokumen dan tarif tunggal Rp 10 ribu dan batasan nilai dokumen hanya di atas Rp 5 juta menjadi tidak senafas dengan penurunan PPh Badan melalui Perppu No.1 tahun 2020 yang sudah menjadi UU No. 2 tahun 2020.
- 6 Hasil pembahasan RUU ini juga belum jelas menetapkan mengenai kondisi perekonomian nasional dan tingkat pendapatan masyarakat dimana tarif dan nominal dapat dinaikkan dan diturunkan.
- 7 Pembahasan RUU masih belum memiliki pasal atau ayat yang cukup kuat untuk mengatur pengawasan dan pengendalian. Sebuah undang-undang sejatinya harus dapat diaplikasikan secara efektif dengan mempertimbangkan rasa keadilan.
- 8 Fraksi PKS tidak sependapat terkait Pasal 32 RUU Bea Materai yang menyatakan bahwa Undang-Undang ini mulai berlaku pada 1 Januari 2021. Hal ini akan menjadi beban baru bagi rakyat dan perekonomian akibat pandemi covid-19 belum dapat diyakini berakhir.



Ada Anggaran Ibukota Baru

Politisi PKS: Arah RAPBN 2021 Tidak Jelas

Ini aneh ada anggaran infrastruktur yang naik berlipat dan masih terdapat pembahasan Ibukota Negara baru disaat mengatasi resesi ekonomi, padahal IKN bukan prioritas. pemerintah seharusnya memprioritaskan program-program yang bersifat padat karya sebagai solusi agar menyerap pekerja-pekerja yang terkena PHK.

H. HIDAYATULLAH, S.E

Anggota Komisi XI DPR RI

Jakarta (09/09) — Anggota DPR RI Komisi XI dari Fraksi PKS, Hidayatullah, menyoroti keganjilan dalam RAPBN 2021 yang sedang dibahas pemerintah dan Badan Anggaran DPR RI.

"Ada anomali jika dibandingkan dengan anggaran negara tahun 2020 yang fokus pada penguatan sisi demand, sementara RAPBN 2021 seolah tak ada kaitannya sama sekali," kata Hidayatullah di Komplek Parlemen, Senayan (09/09).

Menurutnya antar APBN itu harusnya berkesinambungan terukur dan jelas targetan yang

hendak dicapainya.

"Ini aneh ada anggaran infrastruktur yang naik berlipat dan masih terdapat pembahasan Ibukota Negara baru disaat mengatasi resesi ekonomi, padahal IKN bukan prioritas" ujar Hidayatullah.

Menurut Hidayatullah pemerintah seharusnya memprioritaskan program-program yang bersifat padat karya sebagai solusi agar menyerap pekerja-pekerja yang terkena PHK.

"Bukan mandanai program yang padat modal dan bersifat jangka panjang seperti

infrastruktur juga IKN," ujarnya.

Menurut legislator PKS ini ada anomali kebijakan fiskal dari RAPBN 2021 yang pendekatan demand side nya ditinggalkan secara tiba-tiba.

"Anggaran perlindungan sosial turun drastis dari Rp203,9 triliun menjadi Rp110,2 triliun, kenaikan justru terjadi di bidang pertahanan dan keamanan, padahal pandeminya belum akan berakhir," kata Hidayatullah.

Menurut anggota DPR RI asal kota Medan ini, anggaran tahun 2021 harusnya berfokus pada dua hal, yaitu kesehatan dan sosial.

Hidayatullah menjelaskan bahwa sumber utama dari resesi ekonomi ini ada di bidang kesehatan, jadi menurutnya bidang kesehatanlah dahulu yang harus dituntaskan.

"Bahkan Presiden serukan untuk fokus pada anggaran kesehatan, tapi anggarannya malah turun sampai 75 persen lebih, di 2020 dianggarkan Rp87,5 triliun sedangkan pada RAPBN 2021 hanya dianggarkan Rp 25,4 triliun" katanya.



FPKS Soroti Rencana Pindah Ibukota dan Dorong Bappenas Miliki Strategi Hadapi Resesi

“Bagaimana persiapan Bappenas dalam memitigasi krisis yang akan terjadi? Dan bagaimana strategi Bappenas dalam menyusun RPJMN yang sensitif dengan pelbagai kemungkinan krisis termasuk krisis ekonomi global?”

Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag.,M.Si

Anggota Komisi XI DPR RI

Jakarta (08/09) — Sejumlah pertanyaan kritis dan catatan disampaikan oleh Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian PPN/Bappenas dalam RAPBN 2021 di Jakarta, Selasa (08/09).

Dalam pemaparannya, Menteri PPN/Kepala Bappenas menjelaskan salah satu kegiatan strategis Bappenas tahun 2021 adalah koordinasi peminda-

dahan Ibu Kota Negara (IKN).

Menanggapi hal ini, Anis meminta penjelasan dari Menteri PPN/Kepala Bappenas karena kegiatan yang terkait dengan pemindahan Ibukota Negara sebenarnya telah dihentikan di tahun 2020 akibat adanya wabah Covid-19.

Namun dilanjutkan kembali dan masuk dalam kegiatan strategis Bappenas di tahun 2021. Padahal diperkirakan tahun 2021 penuh ketidakpastian, karena wabah Covid-19 yang belum kunjung selesai dan bayang bayang resesi ekonomi global.

“Apakah pemindahan ibukota menjadi hal yang penting di tengah berbagai problematika yang ada?” tanya Anis.

Anis menegaskan bahwa pemindahan Ibukota Negara bukan pekerjaan sederhana. Oleh karena itu memerlukan kajian dan perencanaan secara matang agar eksekusinya efektif, efisien, dan tidak mengganggu siklus bisnis perekonomian baik sektoral, regional dan nasional.

Politisi senior PKS ini juga menyatakan bahwa layak atau tidaknya pemindahan Ibu Kota Negara, perlu dilihat dari berbagai aspek seperti sosial, ekonomi, administrasi, budaya, pertahanan, keamanan, lingkungan, dan aspek lainnya. Dalam sebuah analisis pembangunan ibu kota baru yang tidak diikuti dengan pembangunan fasilitas dan pelbagai kemudahan yang memadai hanya akan menjadikan pemindahan ibu kota tidak berfungsi optimal.

“Kajian- kajian apa saja yang telah dilakukan oleh



BAPPENAS terkait dengan Pemindahan Ibu Kota?” ujarnya.

Hal lain yang disoroti Anis terkait dengan strategi Bappenas dalam menghadapi krisis ekonomi dan terjadinya resesi global.

Sebagai Lembaga perencanaan pembangunan negara, Kementerian PPN memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Politisi dari daerah pemilihan Jakarta Timur ini mengingatkan bahwa sebagai perencanaan pembangunan negara, dengan terjadinya resesi

ekonomi global dan wabah Covid-19, Bappenas harus memiliki strategi yang tepat.

Anis kembali memberikan pertanyaan, “Apakah diperlukan penyesuaian target dan prioritas pembangunan, mengingat dikhawatirkan terjadi kondisi stagnansi ekonomi paska selesainya wabah Covid-19 ?” ungkapnya.

“Bagaimana persiapan Bappenas dalam memitigasi krisis yang akan terjadi? Dan bagaimana strategi Bappenas dalam menyusun RPJMN yang sensitif dengan pelbagai kemungkinan krisis termasuk krisis ekonomi global?” pungkasnya.

Revisi UU MK Harus Memperkuat Kelembagaan dan Hukum di Indonesia

“MK perlu diberikan ruang dalam memberikan penafsiran terhadap Konstitusi. Berbagai ketentuan yang memuat pembatasan (judicial constraint) terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan MK perlu dihilangkan dan dikembalikan pada semangat yang terkandung dalam amandemen konstitusi”

Drs. H. ADANG DARADJATUN

Anggota Komisi III DPR RI

Jakarta (04/09) — Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Adang Daradjatun menyampaikan pandangan akhir mini fraksi dari F-PKS yang pada intinya menyetujui hasil Panitia Kerja RUU Mahkamah Konstitusi (RUU MK) dengan sejumlah catatan di kompleks gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (31/08/2020).

Adang menjelaskan bahwa RUU MK harus mampu memberi penguatan kelembagaan pada MK serta meningkatkan independensi dan profesionalitas dari Hakim Konstitusi.

“MK perlu diberikan ruang dalam memberikan penafsiran terhadap Konstitusi. Berbagai ketentuan yang memuat

pembatasan (judicial constraint) terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan MK perlu dihilangkan dan dikembalikan pada semangat yang terkandung dalam amandemen konstitusi”, ujar Adang.

Fraksi PKS pun berharap perubahan UU MK ini bisa membuat peran MK lebih baik lagi, dan memberikan sumbangsih besar terhadap sistem hukum di Indonesia.

“(Semoga) putusan-putusan yang dikeluarkan dapat menjadi terobosan hukum terhadap pelbagai masalah hukum ketatanegaraan yang kita hadapi dimasa depan”, kata Adang.

Berkas pandangan akhir

mini fraksi dari F-PKS tersebut kepada Pemerintah dengan diwakili oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly, Menpan-RB Tjahjo Kumolo, dan Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran Kementerian Keuangan Didik Kurnaini.

Adang Daradjatun mewakili Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) dalam Rapat Kerja Pengambilan Keputusan Tingkat 1 terhadap Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK).

Sebelumnya, Adang Daradjatun bersama 26 anggota Komisi III yang masuk ke panitia RUU MK akan membahas 101 pasal tetap dari 121 pasal DIM yang diserahkan pemerintah. Pembahasan berlangsung selama 3 hari, sejak Rabu (26/8/2020) dimulai dengan pasal-pasal yang mudah, hingga pembahasan redaksional menandatangani ahli bahasa. Setidaknya terdapat 10 DIM yang masuk ke dalam pembahasan redaksional.



Auditor Halal Tersertifikasi Kunci Pendirian LPH Ledia: Materi Pelatihan Sesuai Kebutuhan

“Untuk mendorong percepatan pembentukan LPH semestinya para calon Auditor Halal segera diberi pelatihan yang sejalan dengan kebutuhan di lapangan, sesuai standar dari Lembaga Sertifikasi Profesi MUI, agar mereka bisa bergabung dengan LPH yang baru

Hj. LEDIA HANIFA A, S.Si., M.Psi.T

Anggota Komisi X DPR RI

Jakarta (10/09) — Rapat RUU Omnibus Law Cipta Kerja Pasal 49 membahas beberapa perubahan pada pasal-pasal Undang-undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Alasan mengapa pemerintah memasukkan RUU Tentang Jaminan Produk Halal ke dalam RUU Cipta Kerja adalah untuk mempermudah para pengusaha dalam memperoleh Sertifikat Halal yang pada saat ini dirasa lama dan rumit.

Anggota Badan Legislatif (Baleg) Ledia Hanifa Amaliah mengkritik hal tersebut.

“Alur penerbitan Sertifikat Halal di dalam Undang-undang sesungguhnya tidak rumit. Kalau kita mau menelisik lebih

dalam, dari berbagai laporan yang kami terima, ternyata bottle neck yang selama ini menjadi penyebab lamanya sertifikat halal keluar adalah karena begitu banyaknya permintaan penerbitan Sertifikat Halal ternyata belum diimbangi jumlah LPH dan auditor halal yang cukup.”, ungkapnya.

Ledia yang merupakan mantan Ketua Panja RUU Jaminan Produk Halal tahun 2013-2014 menjelaskan, sebelum adanya Undang-undang No 33 Tahun 2014 satu-satunya LPH adalah LPPOM MUI, lalu lewat Undang-Undang Jaminan Produk Halal itu dibukalah keran pendirian LPH (Lembaga Pemeriksa Halal)

lain, yang bisa dibentuk oleh ormas atau perguruan tinggi.

“Pendirian LPH ini memiliki satu prasyarat mendasar yaitu memiliki auditor halal yang tersertifikasi, yang artinya memiliki ilmu terkait bahan baku produk dan ilmu terkait kehalalan. Nah, yang jadi persoalan ternyata sampai saat ini belum ada LPH yang berdiri karena terbentur persoalan belum memiliki auditor halal yang tersertifikasi,” urai Ledia.

Mengapa sampai saat ini proses pendirian LPH menjadi begitu lambat? Sekretaris Fraksi PKS ini kemudian sedikit membuka rahasia. Banyak calon auditor halal tidak lulus sertifikasi yang berada di bawah kewenangan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) MUI.

“LSP MUI memang punya kewenangan memberi sertifikasi pada auditor halal yang lulus uji. Kami yakin LSP MUI memang sangat berhati-hati mengeluarkan sertifikasi karena ini terkait persoalan tanggungjawab dunia akhirat. Namun ada keluhan bahwa ternyata koordinasi antara BPJPH dan LSP MUI sendiri seperti belum nyambung. Kabar yang sampai kepada kami, pelatihan yang



diberikan oleh BPJPH kepada para calon auditor halal ternyata tidak berkesesuaian dengan materi ujian dari LSP. Ya, susah lulus dong kalau begitu.” Ungkap Ledia

Karena itu anggota Komisi X DPR RI ini kemudian mengingatkan kepada BPJPH agar segera melakukan pembenahan.

“Untuk mendorong percepatan pembentukan LPH semestinya para calon Auditor Halal segera diberi pelatihan yang sejalan dengan kebutuhan di lapangan, sesuai standar dari Lembaga Sertifikasi Profesi MUI, agar mereka bisa bergabung dengan LPH yang baru.

Hal ini pada akhirnya akan mendukung percepatan terbitnya sertifikat halal yang diajukan para produsen karena produk mereka bisa diuji di banyak laboratorium, tidak antri hanya di LPPOM MUI saja,” terang Anggota Komisi X DPR RI ini.

Selain itu kata Ledia, para auditor halal yang sudah mendapat pengakuan MUI sebelum UU JPH berlaku dan telah berpengalaman selayaknya diakui sebagai Auditor Halal yang bersertifikasi (rekognisi keahlian) sehingga hal ini juga bisa mempercepat hadirnya LPH-LPH baru.

Wakil Ketua FPKS: RUU Cipta Kerja Jangan Hanya Urusi Perumahan Elit

Pemerintah harus bekerja keras untuk merumuskan RUU Cipta Kerja terkait dengan sektor perumahan ini. Jangan berhenti sekedar pada penyesuaian nomenklatur perizinan berusaha yang meliputi keringan sanksi menjadi sekedar sanksi administratif, serta mereduksi kewenangan Pemerintah Daerah.

Dr. H. MULYANTO, M.Eng

Anggota Badan Legislasi DPR RI

Jakarta (10/09) — Dalam pembahasan RUU Cipta Kerja atau RUU Omnibus Law, Anggota Badan Legislasi DPR RI, Mulyanto, meminta Pemerintah untuk jangan hanya memikirkan kemudahan pemberian izin pembangunan rumah elit. Tapi perlu juga memfasilitasi kemudahan pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Menurut Mulyanto, persoalan utama yang dihadapi saat ini adalah penyediaan rumah

untuk MBR terutama yang berpenghasilan tidak tetap.

"Berdasarkan data Kementerian PUPR, backlog perumahan mencapai 7,64 juta unit per awal 2020 yang terdiri atas 6,48 juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) non-fixed income, serta 1,72 juta unit rumah untuk MBR fixed income, dan 0,56 juta unit rumah untuk non-MBR," urainya.

Dilaporkan juga, lanjutnya, bahwa saat ini terdapat 30

persen rumah susun sederhana sewa (rusunawa) kosong di tengah adanya defisit rumah di atas.

"Ini kan aneh. Terjadi ketidaksesuaian, dimana di satu sisi defisit rumah masih besar, sementara di sisi lain, masih ada rusunawa yang kosong penghuni. Ini soal pengelolaan yang tidak pas, yakni pembangunan rusunawa di tempat yang tidak cocok dengan kebutuhan masyarakat," ujar Mulyanto.

Seperti diakui Pemerintah, bahwa sejak diundangkannya UU No. 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, persoalan untuk membangun rumah tinggal dan deret bagi MBR, terutama di kota-kota besar, belum dapat diwujudkan.

Termasuk juga upaya pembangunan hunian berimbang, yang di dalamnya juga terdapat rumah untuk MBR belum terlaksana dengan baik. Kendalanya adalah keterbatasan lahan.

Menurut Mulyanto, Pemerintah harus bekerja keras



untuk merumuskan RUU Cipta Kerja terkait dengan sektor perumahan ini. Jangan berhenti sekedar pada penyesuaian nomenklatur perizinan berusaha yang meliputi keringan sanksi menjadi sekedar sanksi administratif, serta mereduksi kewenangan Pemerintah Daerah.

"Saya minta Pemerintah dapat mencari terobosan baru dalam aspek regulasi, agar terkait persoalan defisit perumahan untuk MBR serta hunian berimbang ini dapat benar-benar terwujud," terang Mulyanto.

Evaluasi secara terintegrasi dan mendalam terhadap persoalan ini nampaknya belum dilakukan

oleh Pemerintah, sehingga tidak muncul usulan-usulan solusi bagi persoalan rumah rakyat ini.

"Pasal-pasal yang ada dalam RUU Cipta Kerja inisiatif Pemerintah terkait soal defisit perumahan serta hunian berimbang terkesan hanya perubahan nomenklatur, bukan soal yang substansial sebagai solusi masalah perumahan nasional," imbuh Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan ini.

"Pengalaman Pemerintah selama 9 tahun melaksanakan UU No.1/2011, nampaknya belum terkrystalisasi untuk dapat memunculkan solusi struktural terkait masalah perumahan ini," tandas Mulyanto.

Fraksi PKS: RUU Cipta Kerja Berpotensi Rugikan Pondok Pesantren

Meski UU tentang Pesantren tidak termasuk yang terdampak Omnibus Law alias Lex Specialis, tetap saja jika ada pihak yang mempersoalkan izin pendirian pesantren, maka yang bersangkutan akan merujuk pada UU Sisdiknas mengingat Pesantren merupakan bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional. Apabila pemangku kebijakan di kemudian hari bersikap represif, maka sangat berpotensi bagi pesantren untuk dipidanakan

KH. BUKHORI, Lc., M.A.

Anggota Komisi VIII DPR RI

Jakarta (10/09) — Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Bukhori Yusuf, melontarkan kritik keras terhadap klausul RUU Cipta Kerja yang berkaitan dengan ancaman denda dan pidana bagi penyelenggara pendidikan formal dan non formal.

Menurut Bukhori, ancaman denda dan pidana tersebut

berpotensi mengkriminalisasi para pendiri pesantren.

Mengingat, lanjutnya, Omnibus Law RUU Cipta Kerja turut berdampak pada perubahan UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

"Khususnya, pada Pasal 71 (versi Omnibus Law) yang menyebutkan bahwa penyeleng-

garan satuan pendidikan yang didirikan tanpa perizinan berusaha dari pemerintah pusat dipidana dengan penjara paling lama 10 tahun dan/atau pidana denda paling banyak 10 miliar rupiah." ucap Bukhori.

Bukhori menambahkan, meski UU tentang Pesantren tidak termasuk yang terdampak Omnibus Law alias Lex Specialis, tetap saja jika ada pihak yang mempersoalkan izin pendirian pesantren, maka yang bersangkutan akan merujuk pada UU Sisdiknas mengingat Pesantren merupakan bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional.

"Apabila pemangku kebijakan di kemudian hari bersikap represif, maka sangat berpotensi bagi pesantren untuk dipidanakan." jelas Bukhori.

Berdasarkan hal tersebut, PKS mengusulkan pasal tersebut diperbaiki agar tidak menimbulkan multitafsir yang berpotensi merugikan lembaga pesantren sebagai salah satu tonggak utama pendidikan bangsa.



Fraksi PKS: Pemerintah Gagal Capai Target RJPMN 2015-2019

“Target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan pemerintah pada RPJMN 2015-2019 rata-rata 7 persen per tahun. Namun, realitanya hanya mampu mencapai rata-rata 5 persen per tahun. Dapat dikatakan pemerintah telah gagal meningkatkan kesejahteraan rakyat

Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si

Anggota Badan Anggaran DPR RI

Jakarta (07/09) – Anggota Badan Anggaran DPR RI dari Fraksi PKS Netty Prasetyani memberikan beberapa kritikan terhadap kinerja pemerintah atas pelaksanaan dana APBN Tahun Anggaran 2019.

Hal tersebut dilontarkan pada saat rapat kerja bersama Menteri Keuangan dan jajaran lainnya yang berasal dari berbagai fraksi di Kantor DPR RI, Senin (07/09).

Menurut Netty, kinerja pemerintah yang kurang memuaskan mengakibatkan tidak optimalnya pembangunan

ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

“Target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan pemerintah pada RPJMN 2015-2019 rata-rata 7 persen per tahun. Namun, realitanya hanya mampu mencapai rata-rata 5 persen per tahun. Dapat dikatakan pemerintah telah gagal meningkatkan kesejahteraan rakyat.” ucap Anggota Komisi IX DPR RI ini.

Tak hanya itu, Netty juga mengungkapkan bahwasanya kesulitan ekonomi yang dialami rakyat disebabkan oleh inflasi

bahan pangan yang melambung hingga 4,3 persen.

“Beberapa komoditas seperti bawang merah, cabai merah, ikan segar, bawang putih, dan cabai rawit menjadi penyumbang inflasi di tahun 2019. Inflasi bahan pangan tersebut lebih tinggi dibandingkan kenaikan upah harian buruh tani yang hanya 3,19 persen. Ini menunjukkan ekonomi rumah tangga menengah ke bawah terus tergerus karena kegagalan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan.” jelas Netty.

Fraksi PKS memberikan minderheid nota (menerima dengan catatan) hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2019 dalam rangka pembicaraan Tingkat I, untuk dilanjutkan dalam tahapan pembahasan selanjutnya.





FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



OPINI
Sabtu 12 September x2020

Satu Semester Covid-19 di Indonesia: Jangan Hanya Dilihat Sebatas Angka

Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYANTI, M. Si.

Anggota Komisi IX DPR RI

Satu Semester Covid-19 di Indonesia: Jangan Hanya Dilihat Sebatas Angka

Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.

Anggota Komisi IX DPR RI

Jika pada awal April lalu kita sudah cukup terkejut dengan jumlah kasus harian yang tembus 300 orang, maka dalam 3 hari terakhir, kasus positif baru di seluruh Indonesia sudah menembus angka 3.000 kasus. Jangankan bicara gelombang kedua, dengan penambahan kasus harian yang semakin tinggi, bahkan kita tidak tahu kapan gelombang pertama covid-19 di Indonesia ini mencapai puncaknya.

Sampai pekan lalu, sudah 105 dokter yang gugur dalam menjalankan tugas menangani

covid-19. Dokter yang gugur pun bervariasi usianya, dari yang memang sudah tua, maupun yang kasih muda. Tidak hanya dokter spesialis paru atau spesialis penyakit dalam, namun juga dari berbagai spesialis, bahkan dokter umum dan dokter gigi juga turut meninggal dunia akibat terpapar covid-19.

Belum lagi tenaga kesehatan lain seperti perawat, petugas laboratorium, bahkan petugas ambulans juga wafat terpapar covid-19. Mengapa penyebaran covid-19 di Indonesia menjadi begitu tidak terkendali?

Polemik Kebijakan Penanganan Covid-19: Terlalu Percaya Diri di Awal

Sejak awal pandemi covid-19 di Indonesia, kebijakan penanganan dan pengendalian penularan covid-19 sudah menimbulkan polemik dan kontroversi. Pemerintah dinilai terlalu percaya diri dalam menghadapi pandemi covid-19 meskipun kalangan medis sudah banyak memperingatkan serangan pandemi ini di Indonesia tidak lama setelah masus infeksi SARS Cov-2 ini mulai berkembang di Wuhan dan belum diberi nama covid-19.

Ketika beberapa pakar bahkan juga peneliti Harvard University menengarai covid-19 sudah masuk Indonesia sejak Februari, Menteri Kesehatan bersikeras bahwa covid-19 belum masuk Indonesia. Ketika WHO sejak 30 Januari menetapkan covid-19 sebagai



Banyak Dokter yang gugur saat berjuang melawan Covid-19

Image : Istimewa

Public Health Emergency of International Concern (PHEIC), saat itu Indonesia masih belum menunjukkan perhatian dan kewaspadaan tinggi.

Pemerintah juga lebih menonjolkan upaya pemulangan WNI dari Wuhan pada 2 Februari 2020 untuk menunjukkan kesiapan Indonesia menghadapi wabah covid-19 dibanding mempersiapkan kebijakan pengendalian penyebaran dan

kesiapan fasilitas kesehatan.

Bahkan ketika pemerintah Arab Saudi pada 27 Februari memusikan Indonesia dalam negara yang jamaah umrahnya dilarang masuk karena diduga covid-19 sudah masuk Indonesia, tidak dijadikan sebagai peringatan untuk membangun kewaspadaan yang tinggi. Bahkan Indonesia justru memprotes kebijakan pemerintah Arab Saudi ini.

Jangankan bicara gelombang kedua, dengan penambahan kasus harian yang semakin tinggi, bahkan kita tidak tahu kapan gelombang pertama covid-19 di Indonesia ini mencapai puncaknya.

Satu Semester Covid-19 ... hal 2



Spanduk Lockdown yang terpasang di pintu-pintu masuk perumahan warga

Image : Kompas

Begitu juga ketika dari dalam negeri, ada kepala daerah mengingatkan ancaman Covid-19 dengan menunjukkan peningkatan jumlah penderita gangguan paru dan pneumonia di rumah sakit dan kematian yang diakibatkannya, justru dibantah oleh Menteri Kesehatan.

Setelah diumumkan kasus pertama tersebut, sampai hampir dua pekan, tidak ada kebijakan pemerintah yang signifikan untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran virus SARS-Cov 2 ini. Kebijakan pembatasan yang dibuat pemerintah untuk pendatang dari luar juga masih sebatas pendatang langsung dari China

Mainland dan dua wilayah di Korea Selatan.

Alih-alih melakukan pembatasan, pada periode tersebut pemerintah justru sibuk mempromosikan daerah tujuan wisata di Indonesia untuk mengundang wisatawan dari luar datang dengan berbagai diskon dan buzzer. Peningkatan pembatasan kedatangan dari luar baru dilakukan pada 20 Maret

Pembatasan Yang Terlambat, Pelonggaran Yang Terlalu Cepat

Pada 16 Maret Pemerintah Indonesia baru menetapkan pandemi covid-19 sebagai bencana nasional. Namun penetapan ini

Pada 16 Maret Pemerintah Indonesia baru menetapkan pandemi covid-19 sebagai bencana nasional. Namun penetapan ini tidak diiringi dengan kebijakan pembatasan yang jelas dan tegas untuk mengurangi penularan covid-19.

tidak diiringi dengan kebijakan pembatasan yang jelas dan tegas untuk mengurangi penularan covid-19.

Pemerintah hanya memberikan himbauan untuk melakukan social distancing. Inisiatif pembatasan yang lebih ketat justru datang dari daerah dengan meliburkan sekolah dan menurut beberapa area publik dan tempat hiburan. Bahkan ketika banyak pihak menyerukan untuk melakukan lockdown atau Karantina Wilayah di episentrum pandemi seperti Jabodetabek, pemerintah pusat belum bergeming.

Beberapa rencana pembatasan oleh pemerintah daerah

juga ditolak dan dianulir oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat juga belum menetapkan status Darurat Kesehatan Masyarakat sebagaimana amanat UU No. 6 Tahun 2018 ketika penyebaran covid-19 sudah meluas ke daerah-daerah dan himbauan social distancing kurang efektif dijalankan.

Baru pada 31 Maret pemerintah menetapkan status Darurat Kesehatan. Namun pilihan pembatasan yang dilakukan bukanlah karantina kewilayahan melainkan hanya dalam bentuk Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) melalui PP No. 21 Tahun 2020 dan pedoman teknisnya melalui

Permenkes No. 9 Tahun 2020.

Pelaksanaanya pun diserahkan kepada pemerintah daerah, beserta implikasi yang timbul. Ini juga berarti bahwa Pemerintah lebih memilih pembatasan daripada karantina yang sebetulnya banyak diharapkan kalangan medis untuk membatasi penyebaran covid-19.

Pembatasan pendudukan yang akan melakukan mudik untuk mencegah penyebaran covid-19 ke daerah juga tidak dilakukan secara tegas. Presiden malah membuat pernyataan yang membingungkan antara mudik dengan pulang kampung.

PSBB juga dinilai serba tanggung untuk melakukan pembatasan kegiatan dan penerapan social distancing untuk mencegah meluasnya penultran covid-19 karena upaya pembatasan transportasi publik oleh pemerintah daerah untuk membatasi mobilitas orang justru ditolak oleh pemerintah pusat. Beberapa negara seperti di Eropa dan Amerika sudah menunjukkan bahwa pembatasan yang longgar menyebabkan peningkatan kasus yang cepat.

Setelah lebih dari dua bulan dari pengumuman kasus pertama, ketika covid-19 belum lagi mereda dan secara nasional penambahan kasus

Satu Semester Covid-19 ... hal 3

harian menunjukkan peningkatan, pemerintah justru menginginkan New Normal. New normal yang dimaksudkan untuk melakukan pelonggaran pembatasan agar ekonomi bisa bergerak namun dengan penerapan protokol kesehatan, pada praktiknya di lapangan hampir diterjemahkan sebagai kembali ke kondisi normal seperti sebelum pandemi.

Masyarakat yang jenuh dengan pembatasan selama dua bulan lebih, kemudian banyak beraktivitas di luar dengan banyak mengabaikan protokol kesehatan. Padahal selama penerapan PSBB pun, banyak tempat-tempat publik maupun di pemukiman padat banyak yang tidak menerapkan protokol kesehatan.

Pelonggaran yang terlalu cepat menimbulkan euforia di masyarakat untuk kembali beraktivitas normal. Pasar, terminal, stasiun dan jalan-jalan kembali ramai. Ruang-ruang publik kembali didatangi warga, aktivitas kantor mulai berjalan yang sayangnya penerapan protokol kesehatannya sebagian tidak ketat. Pemahaman New Normal yang tidak sama diantara berbagai pihak menyebabkan protokol kesehatan yang seharusnya diterapkan banyak yang tidak berjalan dan PSBB menjadi longgar.

Masing-masing sektor membuat aturan sendiri untuk pelonggaran aktivitas. Ketika dalam perjalanan kemudian semakin melonggar dan kedisiplinan penerapan protokol kesehatan juga melemah, sementara covid-19 sudah menyebar luas, maka lahirlah klaster-klaster penularan di berbagai sektor.

Dari mulai klaster perkantoran, klaster pabrik/industri, klaster pasar, klaster pusat perbelanjaan modern, bahkan klaster rumah sakit/fasilitas

kesehatan. Akibat pelonggaran yang dilakukan dan semakin tidak pedulinya sebagian masyarakat akan penyebaran covid, maka klaster penularan menjadi semakin mengkhawatirkan dengan munculnya klaster pemukiman dan klaster keluarga yang korbannya semakin banyak karena intensitas kontak yang semakin dekat dan sering.

Saat pemerintah menganggarkan New Normal, sesungguhnya Indonesia masih jauh dari kriteria WHO untuk bisa

melakukan pelonggaran dan pembatasan. Penularan yang secara keseluruhan belum terkendali, kemampuan tes, tracing, ruang isolasi dan pengobatan yang masih kurang, upaya pencegahan di tempat publik yang belum berjalan baik masih terjadi di Indonesia saat itu.

Demikian pula dengan imported cases yang belum dapat dikendalikan karena pembatasan pendatang yang tidak tegas serta masyarakat yang masih belum terdidik

untuk menerapkan protokol kesehatan dan pola hidup sehat dan bersih. Akibatnya, daerah seperti Jakarta pun yang saat itu sudah relatif terkendali dan membuat kebijakan PSBB Transisi kembali mengalami ledakan kasus akibat pelonggaran yang dilakukan.

Bukan Sekadar Angka

Presiden menyatakan bahwa fokus kita nomor satu tetap kesehatan. Namun, tak dapat



Penerapan New Normal pada lembaga pendidikan

Image : Pikiran Rakyat

Setelah lebih dari dua bulan dari pengumuman kasus pertama, ketika covid-19 belum lagi mereda dan secara nasional penambahan kasus harian menunjukkan peningkatan, pemerintah justru menggaungkan New Normal. New normal yang dimaksudkan untuk melakukan pelonggaran pembatasan agar ekonomi bisa bergerak namun dengan penerapan protokol kesehatan, pada praktiknya di lapangan hampir diterjemahkan sebagai kembali ke kondisi normal seperti sebelum pandemi

Satu Semester Covid-19 ... Tamat



Beban Tenaga Medis kian berat dengan terus naiknya angka positif harian.

Wahana Publik Rakyat

Pemerintah perlu menyadari beban kerja yang berat dan banyaknya tenaga medis yang sudah berguguran dalam membuat berbagai kebijakan. Masyarakat juga perlu sangat disadarkan akan beban kerja para tenaga kesehatan jika mereka terus mengabaikan protokol kesehatan dan menganggap remeh penularan covid-19.

dipungkiri dalam kenyataannya ekonomi masih mendominasi berbagai kebijakan yang dibuat, terutama berbagai upaya untuk melakukan pemulihan ekonomi. Pelonggaran yang dilakukan dengan gaung New Normal pun sangat terasa untuk kebutuhan pemulihan ekonomi.

Demikian pula dengan perubahan Gugus Tugas penanganan covid-19 menjadi Satuan Tugas Penanganan Covid-19 yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Perekonomian dan didominasi menteri-menteri. Padahal selama covid-19 masih terus mengganas, ribuan nyawa berpotensi untuk terus berguguran, termasuk orang-orang terbaik atau potensial di bidangnya, bahkan juga kepala daerah dan pejabat negara/daerah. Bukan tidak mungkin ketika penularan semakin tidak terkendali, kita akan dipaksa untuk menghentikan kembali semua jenis kegiatan.

Setelah satu semester pandemi covid-19 di Indonesia, sudah 181 tenaga kesehatan wafat dan 105 diantaranya adalah dokter dari berbagai bidang. Rasio kematian tenaga medis dan tenaga kesehatan Indonesia pun menjadi tertinggi ketiga di dunia setelah Rusia dan Mesir dan nomor 1 di Asia. Kasus baru harian juga

tidak lagi dalam jumlah ratusan atau seribu-an. Data terakhir per 10 September di situs covid19.go.id menunjukkan penambahan kasus harian yang merupakan rekor tertinggi yaitu sebanyak 3861 kasus. Lebih dari 50 ribu pasien masih dalam perawatan maupun jalani isolasi mandiri. Tanpa perubahan kebijakan yang signifikan, di akhir tahun jumlah terinfeksi covid-19 di Indonesia bisa mencapai 500 ribu orang.

Dokter dan tenaga medis tentu saja perlu diselematkan karena mereka menjadi benteang terakhir dalam penanganan covid-19 di Indonesia. Jika penularan semakin tinggi, beban kerja mereka menjadi semakin berat. Perlu perbaikan sistem beban kerja tenaga medis dan fase istirahatnya.

Pemerintah perlu menyadari beban kerja yang berat dan banyaknya tenaga medis yang sudah berguguran dalam membuat berbagai kebijakan. Masyarakat juga perlu sangat disadarkan akan beban kerja para tenaga kesehatan jika mereka terus mengabaikan protokol kesehatan dan mengganggap remeh penularan covid-19. Pemerintah perlu lebih tegas kepada masyarakat dan memberikan penayadaran akan bahaya penularan covid-19

yang tidak jelas kapan berakhir

Dari sisi kebijakan, kalau pemerintah tidak mau memberlakukan karantina wilayah dalam situasi penyebaran yang semakin sulit dikendalikan, setidaknya PSBB kembali diberlakukan, bahkan perlu diperketat pelaksanaan dan pengawasannya. Jangan ada pelonggaran PSBB atas nama transisi, new normal atau apapun. Langkah Gubernur DKI Jakarta untuk menarik rem darurat (emergency brake policy) penanganan covid-19 dengan kembali ke PSBB awal sudah sangat tepat. Jika kemarin masyarakat maupun kalangan usaha sudah terlanjur kembali beraktivitas normal karena PSBB yang dilonggarkan, maka dengan pengertataan kembali PSBB masyarakat, pelaku usaha maupun pegawai instansi pemerintah dan swasta harus kembali didisiplinkan dalam melaksanakan protokol kesehatan dan pembatasan aktivitas. Perhelatan politik seperti dipakai langsung juga perlu sangat ketat diawasi pelaksanaannya agar tidak menimbulkan klaster baru. Semua pihak harus saling bekerjasama untuk berdisiplin dan pemerintah menjadi komandan dalam kerjasama ini



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Mari Tetap Patuhi Protokol Kesehatan

Anggota FPKS Doakan Walikota Singkawang Segera Sehat

Memang saat ini covid19 sedang naikya, jadi warga tidak boleh menyepelkan, kita semua harus benarbenar menjalankan protokol kesehatan, masker harus dipakai, jauh kerumunan dan selalu cuci tangan

H. ALIFUDDIN, S.E.,M.M

Anggota Komisi IX DPR RI

Jakarta (04/09) — Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS dapil Kalimantan Barat, cukup kaget mendapat kabar positif Covid-19 berupa video singkat dari chai chu mie, Walikota Singkawang, yang beredar di sosial media dan juga grup whatsapp.

Video dengan durasi 2 menit 38 detik yang beredar pada hari Kamis (03/09/2020) malam, berisi penyampaian langsung dari Walikota Singkawang terkait pemeriksaan hasil swabnya.

"Ya sangat kaget juga, setahu saya beliau sangat hati-hati dan disiplin dalam penerapan protokol covid 19, saya yakin beliau bisa bersabar melewati ini," ujarnya.

Alifudin yang saat ini di Jakarta, menyampaikan doanya

agar chai chui mie, segera sehat kembali, dan bisa segera beraktifitas seperti sedia kala.

Alifudin juga berharap masyarakat tetap tenang dan yang penting menerapkan Protokol kesehatan.

"Memang saat ini covid19 sedang naikya, jadi warga tidak boleh menyepelkan, kita semua harus benarbenar menjalankan protokol kesehatan, masker harus dipakai, jauh kerumunan dan selalu cuci tangan," ujar Alifudin yang beberapa bulan lalu menyerahkan bantuan APD ke walikota Singkawang.



Kunker, Syaikhu Tinjau Bangunan SMKN 1 Babelan yang Mangkrak

Saya coba perjuangkan ini. Menanyakan kepada Pemprov Jawa Barat apakah bisa selesaikan ini. Jika tidak, maka akan saya sampaikan ke Pusat

H. AHMAD SYAIKHU

Anggota Komisi V DPR RI

Kabupaten Bekasi (05/09) — Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Ahmad Syaikhu meninjau bangunan SMKN 1 Babelan, Kabupaten Bekasi yang mangkrak, Jum'at (04/09). Kegiatan ini dalam rangka Kunjungan Daerah Pemilihan (Kundapi).

Politisi PKS itu tiba di lokasi sekitar pukul 08.30 WIB. Begitu sampai, Syaikhu segera menuju bangunan yang mangkrak. Gedung tersebut terdiri dari 6 ruang kelas. Kondisi bangunan baru sebatas tembok dan rangka atap.

"Ini sudah berapa lama? Mengapa bisa seperti ini? Apa masalahnya?" Tanya Syaikhu kepada Kepala SMKN 1

Saparudin.

"Bangunan ini telah terbengkalai 5 tahun, Pak. Kontrakturnya meninggalkan begitu saja," jawab Saparudin.

Usai itu, Syaikhu berdialog dengan pihak-pihak terkait di aula. Hadir Kepala Cabang Dinas (KCD) Pendidikan III Casmadi, Anggota F-PKS DPRD Kabupaten Bekasi Ani Rukmini, Saparudin, Komite Sekolah, guru dan tokoh masyarakat setempat.

"Saya mengibaratkan situasi mangkrak ini ibarat seorang anak yang minta ke ayah ditolak. Minta ke ibu tidak diberikan," kata Syaikhu.

Mantan Wakil Walikota Bekasi itu melihat belum ada

kejelasan soal status bangunan yang mangkrak. Seharusnya sudah jadi wewenang provinsi. Namun mungkin karena masa transisi dari kabupaten ke provinsi, sehingga ini belum tuntas.

"Saya coba perjuangkan ini. Menanyakan kepada Pemprov Jawa Barat apakah bisa selesaikan ini. Jika tidak, maka akan saya sampaikan ke Pusat," jelas Syaikhu.

Syaikhu cukup terkejut ketika mengetahui sekolah ini berprestasi. Berbagai piala dari tingkat kabupaten, provinsi dan nasional diperlihatkan oleh Saparudin. Padahal sekolah ini terletak di tengah sawah.

"Ini luar biasa. Meski ada di tengah persawahan tapi SMKN 1 punya Raihan prestasi membanggakan. Bahkan ada 300 calon siswa yang ditolak tahun ini karena kuota," jelas Syaikhu.

Syaikhu juga menyinggung akses menuju sekolah. Untuk tiba di SMKN 1, jalan tanah berlubang dan bergelombang sepanjang 2 KM harus dilewati.



"Jalannya rusak. Masih tanah dan bergelombang serta berlubang. Padahal ini dekat sumur minyak Pertamina. Harusnya mulus," ungkap Syaikhu.

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) itu berharap, fasilitas

pendidikan harus diprioritaskan. Sebab ini kunci membangun bangsa dan negara.

"Fasilitas pendidikan harus jadi prioritas. Itu jika kita serius ingin mencerdaskan dan membangun bangsa ini," tegas Syaikhu.

Andi Akmal Salurkan Bantuan Alsintan ke Kabupaten Maros

Saya berharap ada keberlanjutan bantuan ini hingga menjangkau seluruh kelompok tani yang benar-bener bekerja berkontribusi pada sektor pangan kita

Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P.,M.M

Anggota Komisi IV DPR RI

Kabupaten Maros (06/09) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin menyerahkan bantuan alat mesin pertanian berupa pompa air dan Hand Traktor yang di tujukan pada kelompok-kelompok tani di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan.

Kegiatan ini dilakukan secara bersamaan di beberapa kecamatan dimana penyalurannya juga dibantu oleh seluruh relawan AAP (Andi Akmal Pasluddin), yang tersebar di seluruh kabupaten Maros.

"Karena banyak titik, tidak semua lokasi saya hadir karena keterbatasan waktu. Yang penting dari inti tujuan terlaksana yakni bantuan alat mesin pertanian sampai kepada para petani untuk membantu meningkatkan hasil produksi pertanian", jelas Akmal Anggota

DPR asal Sulawesi Selatan II.

Anggota Komisi IV DPR ini dalam penyaluran alsintan bekerjasama dengan Kementerian Pertanian yang bermitra dengan komisi IV DPR.

Kementerian pertanian secara rutin tiap tahun menyerahkan alsintan pada kelompok-kelompok tani yang belum pernah menerima bantuan.

Sedangkan Andi Akmal sejak tahun 2014 telah aktif menyalurkan di 9 kabupaten Sulawesi Selatan yakni Bulukumba, Sinjai, Bone, Maros, Pangkajene dan Kepulauan, Barru, Soppeng, Wajo, Kota Parepare.

Politisi PKS ini mengatakan, meskipun sudah sembilan kabupaten yang terjangkau bantuan alsintan ini, namun pada skala yang lebih kecil hingga desa, masih

banyak sekali yang belum dapat bantuan pada kelompok-kelompok tani. Sehingga ia akan terus melakukan kegiatan penyaluran alsintan ini selama ia berkesempatan menjalin komunikasi dengan pemerintah menyuatkan aspirasi masyarakat untuk mendapat bantuan penunjang swasembada pangan ini.

"Saya melihat masih banyak yang memerlukan bantuan alsintan ini agar terjadi efektifitas dan efisiensi produksi pangan kita. Antrian kelompok tani masih panjang daftarnya, namun mesti sinkron dengan keterbatasan anggaran pemerintah dalam penyaluran bantuan ini. Saya berharap ada keberlanjutan bantuan ini hingga menjangkau seluruh kelompok tani yang benar-bener bekerja berkontribusi pada sektor pangan kita", jelas Akmal.

Akmal dalam penyaluran bantuan alsintan ini, selain dibantu oleh relawan yang ia bentuk secara mandiri, juga dibantu oleh struktur Dewan Pengurus Daerah PKS kabupaten Maros.

Ini dilakukan agar sumberdaya penyalur semakin lengkap



dan banyak sehingga dapat cepat dan tepat tersalur. Bahkan Ketua pengurus Daerah PKS pun turut hadir menyaksikan bantuan alsintan ini disalurkan.

"Semoga Bantuan-bantuan pemerintah seperti ini dapat disalurkan secara terus menerus untuk mewujudkan ketahanan pangan. InshaAllah bukan hanya alsintan, tapi bibit atau benih, pembinaan sdm

dan berbagai permodalan. Masyarakat masih banyak yang memiliki semangat memproduksi produk pertanian, tetapi tidak memiliki infrastruktur yang memadai. Peran pemerintah akan semakin membantu memperbesar kapasitas produksi bila dilakukan secara merata di seluruh Indonesia", tutup Andi Akmal Pasluddin.

Kunjungan Dapil

Ledia Serahkan Bantuan PIP dan Alat Olahraga

“Berolahraga adalah salah satu jalan kita menjaga kebugaran dan kesehatan tubuh. Perangkat tenis meja ini adalah salah satu upaya untuk mendukung kebugaran dan kesehatan masyarakat

Hj. LEDIA HANIFA A, S.Si., M.Psi.T

Anggota Komisi X DPR RI

Bandung (06/09) — Pada kunjungan ke daerah pemilihan selama akhir pekan lalu, Anggota Komisi X dari Fraksi PKS, Ledia Hanifa Amaliah, memfokuskan kegiatan penyerahan bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) dan bantuan alat olahraga bagi masyarakat.

Sosialisasi sekaligus penyerahan secara simbolis bantuan Program Indonesia Pintar kali ini dilaksanakan di SMPN 31 dan SMPN 62 Kota Bandung.

Meski hadir secara fisik, protokol kesehatan dipenuhi dengan ketat. Orangtua siswa yang mendapat PIP tidak hadir berbarengan, semua wajib mengenakan masker, menggunakan hand sanitizer dan duduk

berjarak selama acara.

“Program Indonesia Pintar ini sudah berjalan beberapa tahun dan diperuntukkan bagi siswa siswi yang memenuhi syarat diantaranya terkategori tidak mampu. Namun khusus untuk masa pandemi ini, penerima PIP lebih diluaskan mengingat kini banyak orangtua siswa yang awalnya tidak termasuk penerima PIP tetapi terkena dampak pandemi covid-19 hingga harus dibantu.” Jelas Aleg dapil Kota Bandung dan Kota Cimahi ini di hadapan para orangtua murid.

Selain menyampaikan alur pendataan dan pencairan dana PIP, Ledia juga mengingatkan orangtua agar bisa memanfaatkan bantuan ini demi

kepentingan sekolah siswa.

“Ini adalah bantuan dari negara, agar anak Indonesia bisa terus belajar dengan baik, tidak terhalang oleh persoalan biaya. Karena itu diharapkan bantuan ini bisa secara maksimal dimanfaatkan untuk kepentingan mendukung pendidikan anak-anak kita,” jelasnya.

Selepas melakukan sosialisasi penyerahan bantuan PIP, Sekretaris Fraksi PKS ini kemudian beraudien dengan masyarakat di Kecamatan Cijaura Buah Batu sekaligus menyerahkan seperangkat alat tenis meja yang merupakan bantuan dari Kemempora.

“Berolahraga adalah salah satu jalan kita menjaga kebugaran dan kesehatan tubuh. Perangkat tenis meja ini adalah salah satu upaya untuk mendukung kebugaran dan kesehatan masyarakat. Semoga bisa dimanfaatkan secara bergantian oleh warga, dan tentu perlu diatur oleh pengurus RW waktu dan peraturannya agar tetap bisa menerapkan protokol kesehatan.” tutur Ledia dalam sambutannya.



Pandemi Meluas hingga Cirebon jadi Zona Merah, Netty Ajak Kolaborasi

Cirebon sudah merah membara, jangan kita biarkan kondisi ini memburuk. Dibutuhkan kesiapan dan kesigapan setiap elemen di Kota Cirebon untuk melandaikan kurva Covid-19

Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si

Anggota Komisi IX DPR RI

Cirebon (06/09) — Kasus Covid-19 terus meningkat, Cirebon makin merah membara. Netty Prasetiyani, Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS melakukan sosialisasi pencegahan Covid-19 dan pemberian bantuan paket alat cuci tangan untuk lembaga pendidikan dan rumah ibadah di kota Cirebon.

"Penanganan Covid-19 membutuhkan kolaborasi optimal antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah harus menunjukkan pengelolaan pandemi secara efektif dan masyarakat perlu terus meningkatkan partisipasinya. Kegiatan sosialisasi protokol kesehatan masyarakat dalam adaptasi kebiasaan baru merupakan upaya kolaborasi melawan Covid-19," ungkap Netty di

Gedung Korpri, Kota Cirebon.

Kegiatan sosialisasi yang merupakan kerjasama Kementerian Kesehatan dan Komisi IX DPR RI ini dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Cirebon, Eti Herawati.

"Saya berterima kasih kepada Kementerian Kesehatan dan Komisi IX DPR RI yang telah membantu Pemkot Cirebon memberikan sosialisasi pencegahan penularan Covid-19 kepada masyarakat. Upaya penyesuaian ini harus dilakukan terus menerus agar masyarakat tertib dan terlibat dalam perang melawan pandemi," ujar Eti.

Wakil Ketua Fraksi PKS ini menambahkan, "Ayo, kita lawan Covid-19 dari rumah dengan gerakan 3 M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Kita pasti-

kan setiap anggota keluarga saling menjaga dan melindungi."

Menurut situs pemerintah, per 5 September 2020, tercatat 105 kasus terkonfirmasi positif di kota Cirebon.

"Cirebon sudah merah membara, jangan kita biarkan kondisi ini memburuk. Dibutuhkan kesiapan dan kesigapan setiap elemen di Kota Cirebon untuk melandaikan kurva Covid-19. Pemerintah pusat dan daerah harus membuat kebijakan yang benar dan efektif agar berdampak signifikan pada penurunan kasus. Jika pemerintah dipercaya masyarakat, maka setiap kebijakannya akan ditaati," ujarnya.

Dalam kesempatan acara yang dihadiri masyarakat dengan penerapan protokol kesehatan ini, Netty meminta Pemerintah kota memastikan ketersediaan fasilitas layanan kesehatan yang memadai, dukungan pada para tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugasnya, bantuan pada masyarakat terdampak serta memastikan tidak terjadi kluster baru penularan Covid-19.



Diskusi Dengan Pengelola Pusat Kuliner

Anis Tegaskan UMKM Berkontribusi bagi Ekonomi Nasional

“Insya Allah jika semua pihak yang terlibat memiliki semangat dan tekun, PKK akan menjadi bagian dari kelompok UMKM yang memberikan kontribusi besar untuk perekonomian nasional

Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag.,M.Si

Anggota Komisi XI DPR RI

Jakarta (06/09) — Anggota DPR RI dari Jakarta Timur dari Fraksi PKS, Anis Byarwati membersamai pengelola dan para pedagang Pusat Kuliner dan Kongkuk (PKK) Kalisari dalam acara DE NGaji KULiah Forum (Dengkul Forum) yang diselenggarakan secara virtual.

Pengelola PKK Kalisari adalah anak-anak muda kader PKS Kalisari-Pasar Rebo Jakarta Timur. Mereka adalah anak2 muda produktif, harapan masa depan bangsa. Diskusi sekaligus soft launching PKK ini, bertajuk : UMKM Forum 2020, Kebangkitan Ekonomi Umat di Tengah Pandemi dengan Membangun Usaha Berjamaah.

Anggota komisi XI DPR RI ini, menjelaskan mengenai

peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia dan pengembangannya. Anis menyatakan bahwa peran UMKM atau Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam pertumbuhan perekonomian suatu negara dinilai sangat penting.

“UMKM memiliki kontribusi besar dan krusial bagi perekonomian Indonesia,” ungkapnya.

Anis kemudian mengurai kriteria UMKM berdasarkan UU no.20 tahun 2008 yang menjelaskan bahwa usaha mikro adalah usaha dengan aset maksimal Rp 50 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) dan omzet maksimal Rp 300 juta per tahun.

“Usaha Kecil adalah usaha dengan aset lebih dari Rp 50

juta - Rp 500 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) dan omzet maksimal lebih dari Rp 300 juta - Rp 2,5 miliar per tahun,” urainya.

“Usaha Menengah adalah usaha dengan aset lebih dari Rp 500 juta - Rp 10 miliar (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) dan omzet lebih dari Rp 2,5 miliar - Rp 50 miliar per tahun. Dan Usaha Besar adalah usaha dengan aset lebih dari Rp 10 miliar (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) dan omzet lebih dari Rp 50 miliar per tahun,” imbuh Anis.

Sementara untuk klasifikasi UMKM, Anis menjelaskan 4 klasifikasi yaitu pertama Livelihood Activites, merupakan UMKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai informal.

Kedua Micro Enterprise, merupakan UMKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan,” sebutnya.

Ketiga, kata Anis, Small Dynamic Enterprise, merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa



kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.

“Dan keempat Fast Moving Enterprise, merupakan UMKM yang memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi Usaha Besar (UB),” ungkapnya.

Berbicara tentang upaya pengembangan UMKM, Anis memberikan 9 poin yang menjadi catatannya. Kesem-

bilan poin tersebut adalah Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif, Bantuan Permodalan, Perlindungan Usaha, Pengembangan Kemitraan, Pelatihan, Pembentukan Lembaga Khusus, Pemantapan Asosiasi, Pengembangan promosi dan Pengembangan Kerjasama yang Setara.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Aleg PKS Sesalkan Logo Parpol Digambarkan sebagai Sila Keempat dalam Siaran Pendidikan

“Kejadian ini sangat disayangkan ya, terlebih logo tersebut muncul dalam tayangan yang ditujukan sebagai upaya menyalurkan pendidikan bagi anak-anak. Tetapi justru secara tidak bertanggung-jawab terkesan dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk menjalankan agendanya

Ir. H. SIGIT SOSIANTOMO

Anggota Komisi V DPR RI

Surabaya (09/09) — Anggota DPR dari Fraksi PKS asal Surabaya, Sigit Sositomoto, menyayangkan munculnya logo sebuah parpol berlambang kepala banteng sebagai Sila keempat Pancasila dalam Siaran Pendidikan, beberapa hari terakhir ini.

Sigit menjelaskan, sejak awal semester siswa-siswi Sekolah Dasar di Surabaya, sebagian besar mendapat arahan dari sekolah masing-masing untuk menyaksikan siaran langsung mengenai pendidikan di saluran SBO TV bertajuk GURU-ku.

“Siaran ini berlangsung setiap hari Senin-Sabtu di pagi hingga siang hari dan

berlangsung secara bergantian sesuai jenjang kelas masing-masing. Sayangnya, siaran yang seharusnya ditujukan bagi para siswa-siswi untuk mengenyam pendidikan ini justru melakukan kesalahan fatal pada siaran hari Selasa (8/9) lalu,” ungkap Anggota Komisi V DPR RI ini.

Pada siaran program TV di hari Selasa tersebut, lanjutnya, tepat pada saat pengajaran bagi siswa-siswi kelas 1 SD, terdapat satu skenario dimana logo khas dari Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDIP), yaitu hewan banteng ditayangkan.

“Sayangnya yang menjadi semakin mengkhawatirkan adalah penjelasan dari guru

yang mengajar pada saat itu bahwa logo tersebut digambarkan sebagai lambang sila keempat Pancasila,” urai Sigit.

“Kejadian ini sangat disayangkan ya, terlebih logo tersebut muncul dalam tayangan yang ditujukan sebagai upaya menyalurkan pendidikan bagi anak-anak. Tetapi justru secara tidak bertanggungjawab terkesan dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk menjalankan agendanya,” imbuh Sigit yang menjadi Anggota DPR RI dari Dapil Jawa Timur I.

Secara lebih dalam, kata Sigit, program TV GURUku adalah sebuah program pendidikan yang merupakan program alternatif kegiatan belajar mengajar di masa pandemi COVID-19 yang merupakan hasil kerjasama antara SBO TV dengan Dinas Pendidikan Kota Surabaya.

Dengan bentuk Kerjasama yang dilaksanakan dengan instansi pemerintah tersebut, tambahnya, sudah sepatasnya SBO TV sebagai pemilik hak siar melakukan pengecekan dan pengawasan lebih dalam mengenai bahan-bahan siaran yang akan ditayangkan.



“Timeline politik saat ini yang telah memasuki masa-masa proses Pilkada Serentak 2020 turut menimbulkan kecurigaan. Apakah sebenarnya upaya tersebut sengaja dilakukan sebagai bentuk kampanye yang berusaha disamarkan? Kalau memang seperti itu keinginannya, sungguh hal tersebut sangat mengkhawatirkan dan tidak memberikan contoh yang baik bagi masyarakat.” tambah Sigit

yang juga asli Surabaya.

Seperti yang diketahui bahwa baru hari Minggu (06/9) lalu, KPU menutup pendaftaran bagi para bakal calon kepala daerah secara nasional.

Surabaya termasuk dalam salah satu daerah yang juga akan menyelenggarakan pemilihan Walikota pada Pilkada serentak dalam waktu dekat ini.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Nevi Zuairina Salurkan Bantuan Alat Mesin Pertanian di Kabupaten Pasaman

Saya berharap program-program yang menyentuh langsung masyarakat dapat kita teruskan. Sinkronisasi pemerintah daerah dan pemerintah pusat akan semakin efektif dan efisien dalam ketepatan sasaran dan ketepatan waktu untuk mempercepat pemulihan wabah saat ini

Hj. NEVI ZUAIRINA

Anggota Komisi VI DPR RI

Pasaman (09/09) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS asal Sumatera Barat, Nevi Zuairina disela-sela sidang yang dilakukan secara daring berkesempatan mengunjungi beberapa kelompok tani di Kabupaten Pasaman.

Sidang DPR yang ia lakukan secara jarak jauh membawa hikmah ia mampu sekaligus bertemu dengan masyarakat di daerah tidak tergantung pada jarak dan waktu.

"Alhamdulillah saya bertemu langsung menyerahkan beberapa alat mesin pertanian kepada kelompok tani di pasaman ini tanpa harus meninggalkan sidang komisi di DPR RI. Jadi

bertemu masyarakat saat ini tidak tergantung masa reses. Semakin banyak masyarakat yang kita temui, semakin banyak aspirasi dari bawah kita dapatkan untuk disampaikan kepada pemerintah pusat agar mendapat solusi segala persoalan yang terjadi di masyarakat", tutur Nevi.

Anggota DPR Komisi VI ini melihat, para petani di kabupaten pasaman masih banyak yang tergolong pada skala mikro dan kecil.

Sehingga dengan adanya alat mesin pertanian yang dapat mereka gunakan secara bersama dan bergantian dalam satu kelompok, ia berharap ada peningkatan kapasitas produksi

yang secara tidak langsung akan meningkatkan tingkat perekonomian rumah tangga para petani.

Bukan hanya persoalan ekonomi para petani, Nevi juga mengatakan bahwa upaya peningkatan tata kelola pertanian yang di mulai dari hulu berupa penyiapan tanah hingga masa tanam, akan berujung pada peningkatan hasil produk pertanian sehingga sejalan dengan program pemerintah untuk mencapai swasembada beberapa produk pertanian yang hingga kini banyak yang belum tercapai sehingga marak produk pertanian impor.

"Seruan kami untuk kurang dan terus kurang impor tidak cukup hanya tataran wacana saja. Mesti dimulai dari upaya apa sumber kenapa kita impor. Salah satunya stok dalam negeri kurang. Untuk itu harus dicukupkan stok dalam negeri dengan meningkatkan hasil produk pertanian kita. Tapi jika tidak ada upaya peningkatan teknologi atau dukungan kebijakan pada petani, kita selamanya akan tetap seperti ini", jelas Nevi.

Politisi PKS ini



menekankan, bahwa kita saat ini sektor pertanian masih sangat tahan terhadap guncangan pandemi covid-19. Untuk itu, ini mestinya dijadikan perhatian pemerintah secara serius untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

Nevi mengisyaratkan, bahwa ketika masyarakat masih mudah menemukan makanan, selama itu stabilitas sosial dan stabilitas politik tetap terjaga.

"Saya berharap program-program yang menyentuh

langsung masyarakat dapat kita teruskan. Sinkronisasi pemerintah daerah dan pemerintah pusat akan semakin efektif dan efisien dalam ketepatan sasaran dan ketepatan waktu untuk mempercepat pemulihan wabah saat ini. Program alsintan untuk kelompok tani ini hanya sebagian kecil yang bisa dilakukan. Masih banyak yang perlu dilakukan untuk memulihkan ekonomi rakyat kecil di tengah pandemi covid-19", tutup Nevi Zuairina.



FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



**HAORNAS
2020**

Jangan lupa untuk selalu
berolahraga dengan tetap
memperhatikan protokol
kesehatan

HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI
Ketua MKD DPR RI



HNW: Sumatera Barat dari Dulu Hingga Sekarang Erat dengan Pancasila

“Bagi yang lupa sejarah, baik klasik maupun kontemporer, ingatlah ajaran Bung Karno: Jas Merah! Sumatera Barat itu erat kaitannya dengan Pancasila dari dulu hingga sekarang. Kita semua harus berani jujur memahami sejarah, agar bisa menghargai semua daerah yang ada di Indonesia, agar tetap kokoh kuatlah NKRI

Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A

Anggota Komisi VIII DPR RI

Jakarta (05/09) — Anggota DPR dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid, memberikan catatan atas pernyataan Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Puan Maharani, terkait penilaiannya agar Sumatera Barat (Sumbar) mendukung Negara Pancasila, yang mendapatkan respons luas, karena dinilai tidak sesuai fakta, dan menyakitkan banyak rakyat Sumbar.

Apalagi lanjut pria yang akrab disapa HNW ini, ditambah

dengan klarifikasi politik PDIP Zuhairi Misrawi yang berangkat dari prasangka buruk/negatif thinking terhadap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang selama 10 tahun, kadernya dipilih rakyat untuk memimpin Sumbar.

“Bagi yang lupa sejarah, baik klasik maupun kontemporer, ingatlah ajaran Bung Karno: Jas Merah! Sumatera Barat itu erat kaitannya dengan Pancasila dari dulu hingga sekarang. Kita semua harus

berani jujur memahami sejarah, agar bisa menghargai semua daerah yang ada di Indonesia, agar tetap kokoh kuatlah NKRI,” ujarnya melalui siara pers di Jakarta, Jumat (04/09/2020).

Wakil Ketua MPR RI ini juga menuturkan banyak tokoh dari yang sekarang disebut Provinsi Sumatera Barat, terlibat langsung merumuskan dan memutuskan Pancasila sebagai dasar Negara, bersama Soekarno, kakek dari Puan Maharani.

“Mereka ada yang di BPUPKI, Panitia Sembilan, atau terlibat saat memfinalkan Pancasila pada 18 Agustus 1945 bersama PPKI. Tokoh-tokoh tersebut, antara lain Mr. M. Yamin, Drs. M Hatta, dan H Agus Salim,” ujarnya.

HNW juga menilai wajar apabila (warga) Sumatera Barat dari dulu hingga sekarang pun tetap istiqamah dengan Pancasila yang disepakati final pada 18 Agustus 1945, sebagai komitmen mereka terhadap hasil perjuangan para tokoh bangsa, yang berasal dari Sumbar.

“Masyarakat Sumbar,



termasuk kader-kader PKS di sana, dari dulu sampai sekarang tetap melaksanakan Pancasila, dan tidak pernah mengusulkan untuk ubah Pancasila yang bisa diperas menjadi Trisila atau Ekasila. Mereka juga tak pernah usulkan perubahan Sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, menjadi Ketuhanan yang berkebudayaan. Hal-hal kontroversial yang tercantum dalam RUU HIP yang ditolak oleh khalayak ramai itu,” jelasnya.

Memang benar, selama 10 tahun terakhir Sumbar dipimpin

oleh Prof Irwan Prayitno, tokoh Minang yang kader PKS juga. Beliau dipilih secara demokratis dan dimenangkan oleh mayoritas warga Sumbar.

Seandainya, Beliau dan PKS tidak mendukung Pancasila, yang itu artinya mengkhianati warisan perjuangan tokoh-tokoh Bangsa dari Sumbar, tidak mungkin Warga Sumbar memenangkan Beliau, sampai 2 kali pemilihan Gubernur.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Selamat Jalan
Bapak Jakob Oetama
Pendiri Kompas Gramedia

27 September 1931 - 9 September 2020





Ketahui segala informasi
terkini ikhtiar politik
PKS di Parlemen

Kunjungi

KANAL RESMI FRAKSI PKS DPR RI



Website
fraksi.pks.id



Instagram
[fraksipksdprri](https://www.instagram.com/fraksipksdprri)



Twitter
[@fraksipksdprri](https://twitter.com/fraksipksdprri)



Facebook
Fraksi PKS DPR RI



Youtube
PKSTV DPR RI

fraksi.pks.id